



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025



HAMENGGU BUWONO X
GUBERNUR DIY



PAKU ALAM X
WAKIL GUBERNUR DIY

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun berdasarkan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY. Visi Gubernur Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2023 pada intinya adalah **untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya** (yaitu "*Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017*" dan "*Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017- 2022*"), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini. Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:

Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Terwujudnya 'Pancamulia', menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi ***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi***, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui Reformasi Kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Adapun tema pembangunan tahun 2025 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasioanl (RPJMN 2025-2029), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2025 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP 2025).

Memperhatikan hal-hal tersebut dan selaras dengan tema RKP tahun 2025 yang tidak mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan hasil evaluasi capaian pembangunan maka tema Perubahan RKPDIY Tahun 2025 masih tetap sama dengan tema RKPDIY Tahun 2025 yaitu;

“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan
Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan.
2. Kreatif dan inovatif
Kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan ide, gagasan, cara, atau produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda.
3. Ekonomi Inklusif
Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

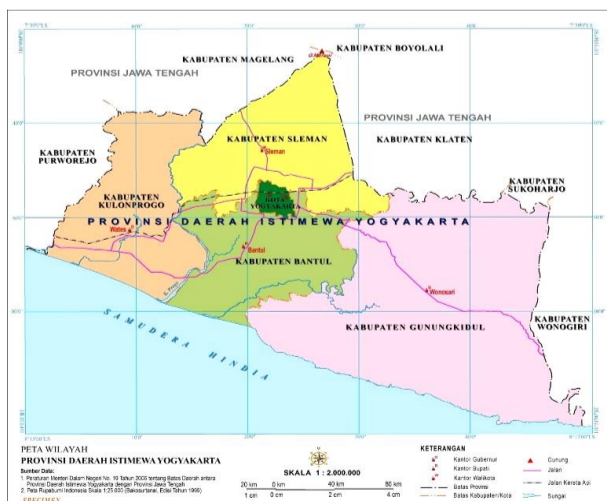
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2025 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2025 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7^o.33’-8^o.12’ Lintang Selatan dan 110^o.00’-110^o.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

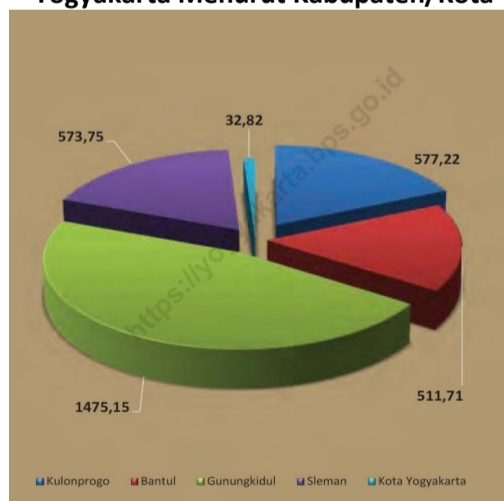
1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%);
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%);
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%).

Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Lampiran UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS, 2024

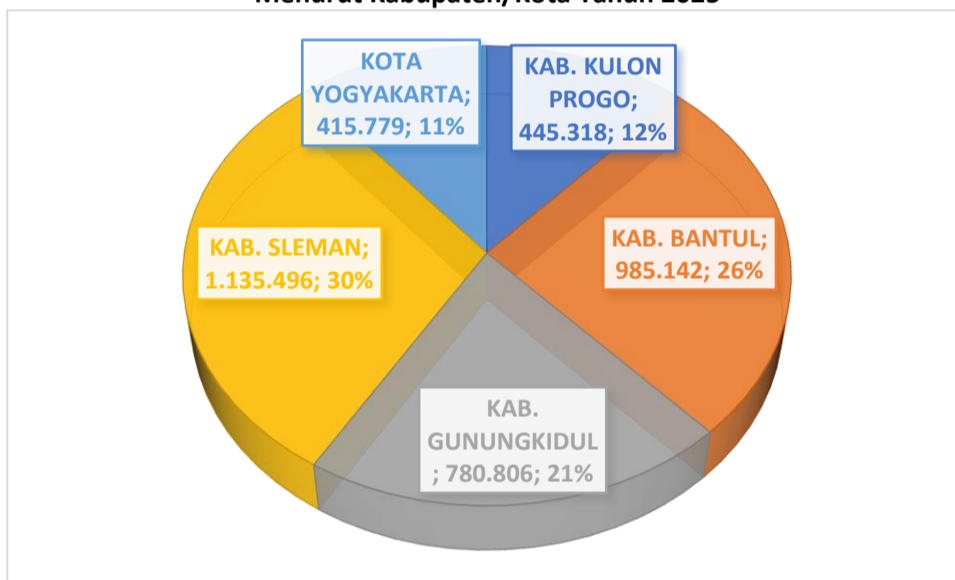
Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester 2 tahun 2025 adalah sebanyak 3.762.541 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2025 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.135.496 orang (30,18%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 985.142 orang (26,18%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 780.806 orang (20,75%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 445.318 orang (11,84%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 415.779 orang (11,05%).

Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

KODE	WILAYAH	JML PENDUDUK			PERSENTASE (%)		
		L	P	JML	L	P	JML
3401	KAB. KULON PROGO	220.731	224.587	445.318	5,87	5,97	11,84
3402	KAB. BANTUL	490.577	494.565	985.142	13,04	13,14	26,18
3403	KAB. GUNUNGKIDUL	386.337	394.469	780.806	10,27	10,48	20,75
3404	KAB. SLEMAN	562.285	573.211	1.135.496	14,94	15,23	30,18
3471	KOTA YOGYAKARTA	202.517	213.262	415.779	5,38	5,67	11,05
3400	DIY	1.862.447	1.900.094	3.762.541	49,50	50,50	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2025

Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2025

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 14 Kemantren (setingkat kecamatan di kota) dan 64 Kapanewon (setingkat kecamatan di kabupaten) serta 438 Kalurahan/Kelurahan. Berdasarkan Pergub DIY 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, masing-masing kabupaten telah menerapkan perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan menjadi kemantren/kapanewon dan desa menjadi kalurahan sejak tahun 2021 secara penuh sebagaimana tersebut di dalam tabel sebagai berikut.

Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan	Kelurahan
1	Kulon Progo	12	87	1
2	Bantul	17	75	-
3	Gunungkidul	18	144	-
4	Sleman	17	86	-
5	Kota Yogyakarta	14	-	45
	DIY	78	392	46

Sumber: DPMKKPS DIY, 2026

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam

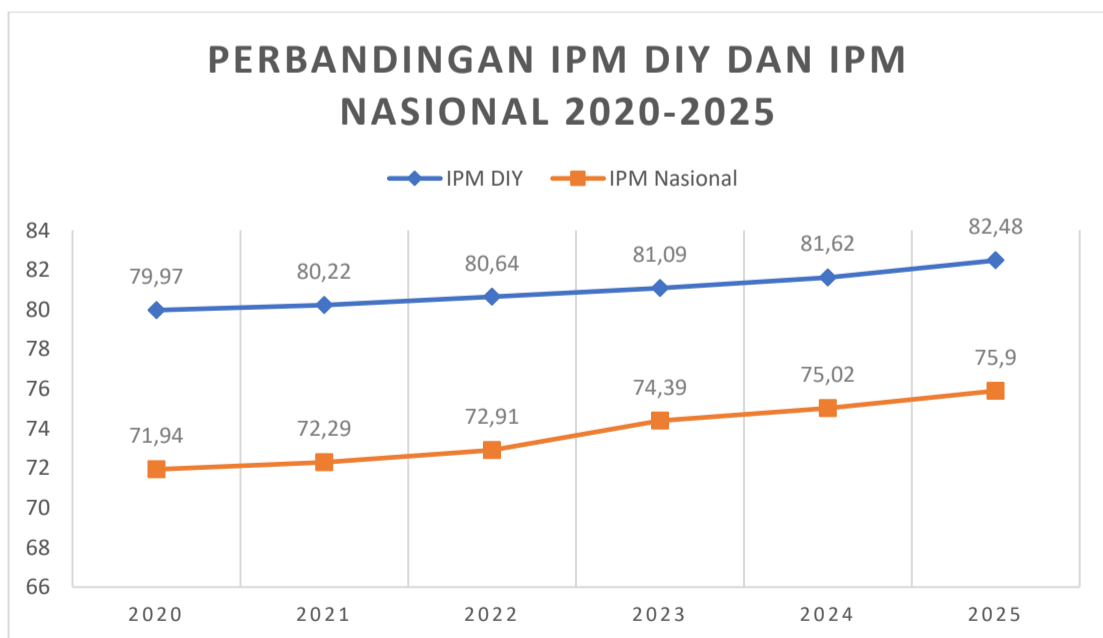
pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemda DIY pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2024)	Capaian Kinerja Tahun N (2025)	Perubahan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,62	82,48	$\frac{(82,48-81,62)}{81,62} \times 100\%$ =1,05%	Nilai Positif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2024
2	Angka Kemiskinan	10,40%	10,08%	$\frac{(10,08-10,40)}{10,40} \times 100\%$ =-3,08%	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2024
3	Angka Pengangguran	3,48%	3,30%	$\frac{(3,30-3,48)}{3,48} \times 100\%$ =-5,17%	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2024
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,49	$\frac{(5,49-5,03)}{5,03} \times 100\%$ =9,14%	Nilai Positif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2024
5	Pendapatan Per Kapita	51,47 juta rupiah	55,04 juta rupiah	$\frac{(55,04-51,47)}{51,47} \times 100\%$ =6,94%	Nilai Positif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2024
6	Ketimpangan Pendapatan	0,428	0,414	$\frac{(0,414-0,428)}{0,428} \times 100\%$ =-3,27%	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2024

Sumber: BPS, 2026

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



Sumber: BPS, 2025, diolah

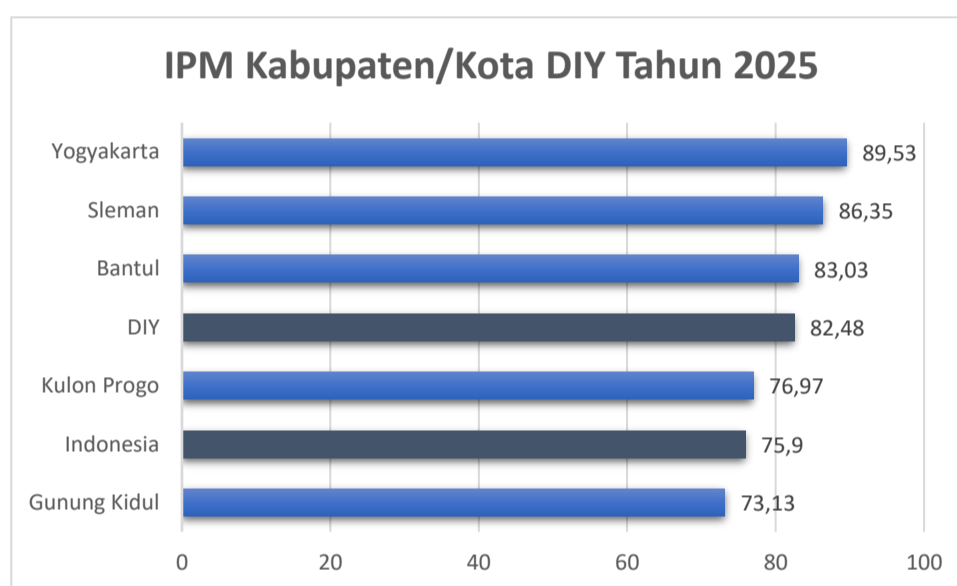
IPM DIY tahun 2025 sebesar 82,48, mengalami kenaikan 1,22 dibandingkan IPM tahun 2024. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Nilai IPM DIY pada masing-masing dimensi dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Nilai Indeks Komponen IPM DIY 2021-2025

Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	75,04	75,08	75,18	75,36	75,64
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,64	15,65	15,66	15,70	15,78
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,64	9,75	9,83	9,92	10,20
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Rp000	14.111	14.482	14.924	15.361	15.855

Sumber: BPS, 2025

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2021-2024 mengindikasikan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”. Tahun 2025 IPM Kota Yogyakarta mencapai 89,53 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 86,53 dan 83,03. Ketiga kabupaten/ kota tersebut menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Sementara IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 76,97 dan 73,13 dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”. Nilai IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM DIY dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

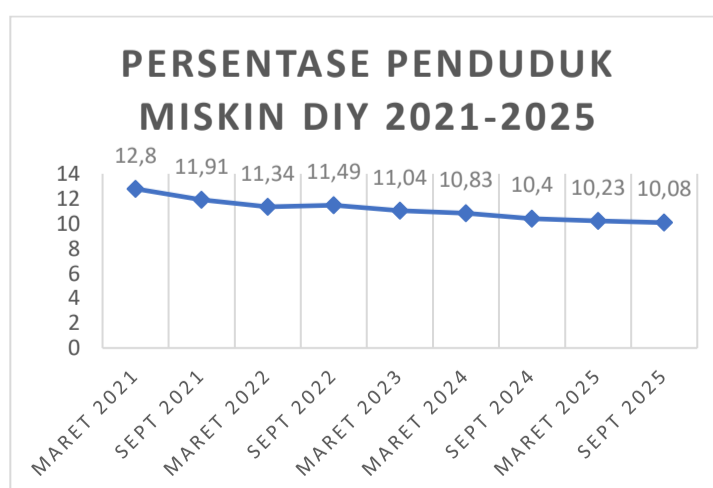


Sumber: BPS, 2025, diolah

IPM Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY, sementara IPM Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah IPM DIY. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, hanya Kabupaten Gunungkidul yang memiliki nilai IPM di bawah IPM Nasional.

2. ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan menjadi salah satu indikator pengukuran kemiskinan, yang merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemda DIY terus melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan memfokuskan penanganan kemiskinan pada lokasi prioritas. Pada tahun 2025, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 10,40% menjadi 10,08%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Persentase penduduk miskin DIY dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2026

Selama periode tahun 2021 hingga 2025, persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan sebesar 12,80%, terus menurun hingga mencapai 10,08% pada September 2025. Angka tersebut merupakan angka yang terendah selama periode lima tahun terakhir. Tren penurunan ini diharapkan berlanjut pada periode berikutnya seiring dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah DIY. Selain persentase angka kemiskinan yang terus menurun, jumlah penduduk miskin secara absolut juga terus menurun. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah dapat dilihat pada table berikut:

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Daerah
September 2024 – September 2025**

Daerah	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan	September 2024	316,81	10,11
	Maret 2025	321,04	10,16
	September 2025	319,12	9,99
Perdesaan	September 2024	113,66	11,31
	Maret 2025	104,77	10,46
	September 2025	103,67	10,37
Total	September 2024	430,47	10,40
	Maret 2025	425,82	10,23
	September 2025	422,79	10,08

Sumber: BPS, 2026

Selama periode September 2024 hingga September 2025 jumlah penduduk miskin di DIY terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 430.470 orang, dan pada September 2025 sebanyak 422.790 orang. Berdasarkan analisis BPS, berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan DIY selama periode September 2024 - September 2025:

1. Pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta pada triwulan III-2025 terhadap triwulan III-2024 sebesar 5,40% (y-on-y). Ekonomi D.I. Yogyakarta tumbuh positif dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa;
2. Inflasi Maret 2025 relatif terkendali yaitu sebesar 2,56% (y-on-y);
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 sebesar 110,58% yang menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani;
4. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,29% pada Triwulan III-2025 (y-on-y);
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 sebesar 3,46% menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,02% poin dibandingkan Agustus 2024 (3,48%).
6. Berbagai program bantuan sosial telah dikururkan oleh Pemerintah Pusat selama periode Januari-Maret 2025, antara lain Bantuan Pangan Beras, BPNT, PKH, PIP, MBG, dan BLT Dana Desa. Berbagai program pengentasan kemiskinan juga dikururkan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, seperti Jaminan Sosial Lanjut Usia/JSLU dll.

3. ANGKA PENGANGGURAN

Angka pengangguran direfleksikan dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada November 2025, TPT DIY adalah sebesar 3,30%, mengalami penurunan 0,18% poin dibanding TPT Agustus 2024 yang sebesar 3,48% dan sebesar 0.16% poin dibanding Agustus 2025. Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2025 sebanyak 2,27 juta orang, mengalami kenaikan 17,38 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,48%, mengalami penurunan 0,3% poin dibandingkan Agustus 2024 dan sebesar 0.26% poin dibandingkan Agustus 2025. Kondisi penduduk usia kerja dan angkatan kerja di DIY dari Agustus 2024 hingga November 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2024-November 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2024 (ribu orang)	Agustus 2025 (ribu orang)	November 2025 (ribu orang)
Penduduk usia kerja	3.024,06	3.049,13	3.055,66
Angkatan kerja	2.261,44	2.278,81	2.275,84
- Bekerja	2.182,77	2.200,07	2.200,81
- Pengangguran	78,67	78,74	75,03
- Bukan angkatan kerja	762,62	770,31	779,82

Sumber: BPS, 2026

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2024 hingga November 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY November 2025 mengalami penurunan 0,18% poin dibandingkan TPT DIY Agustus 2024. Penurunan TPT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di daerah perkotaan, TPT mengalami penurunan 0,31% poin, dari 3,97% menjadi 3,66%. Sementara, TPT di pedesaan mengalami penambahan sebesar 0,05% poin, dari 2,04% menjadi 2,15%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Agustus 2024 hingga November 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAC mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAC DIY pada November 2025 sebesar 74,48%, mengalami penurunan sebesar 0,3% poin jika dibandingkan Agustus 2024.

4. PERTUMBUHAN EKONOMI

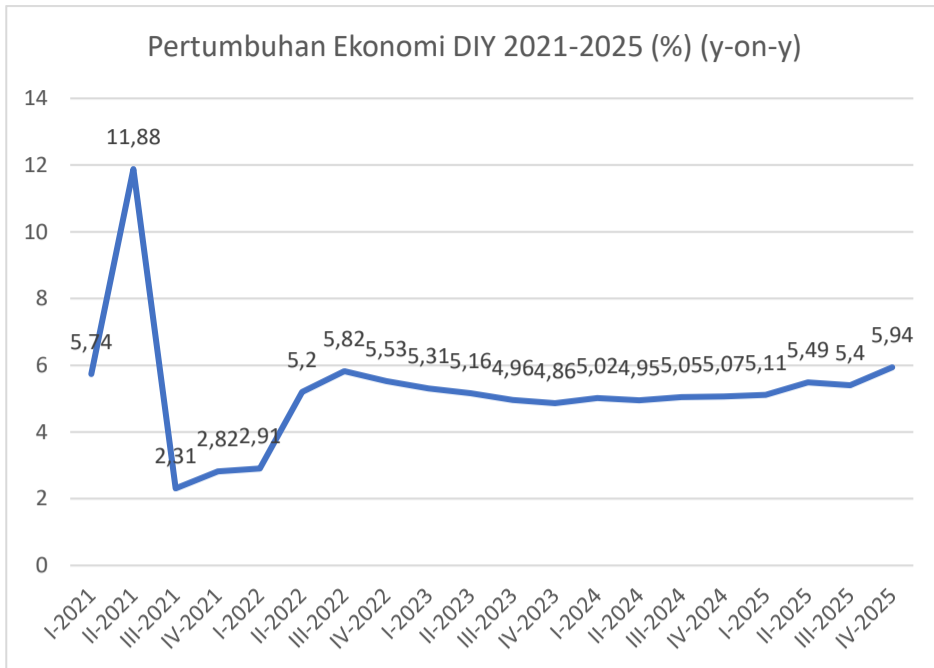
Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2025 sebesar 5,49% (*c-to-c*). Dibandingkan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 lebih besar 0,46% poin. Perekonomian DIY pada triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,94% (*y-on-y*), dan terhadap triwulan III-2025 tumbuh sebesar 3,45% (*q-to-q*). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai Rp208.133.798 juta, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp131.435.937 juta. PDRB DIY atas dasar harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2024 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Per Triwulan Tahun 2024 dan 2025

PDRB	TW I (juta rupiah)	TW II (juta rupiah)	TW III (juta rupiah)	TW IV (juta rupiah)
PDRB ADHB 2024	47.619.490	48.074.380	48.116.730	49.751.344
PDRB ADHB 2025	50.978.160	51.611.330	51.723.430	53.820.880
PDRB ADHK 2024	30.680.710	30.937.077	31.033.267	31.939.395
PDRB ADHK 2025	32.249.330	32.640.040	32.708.400	33.838.170

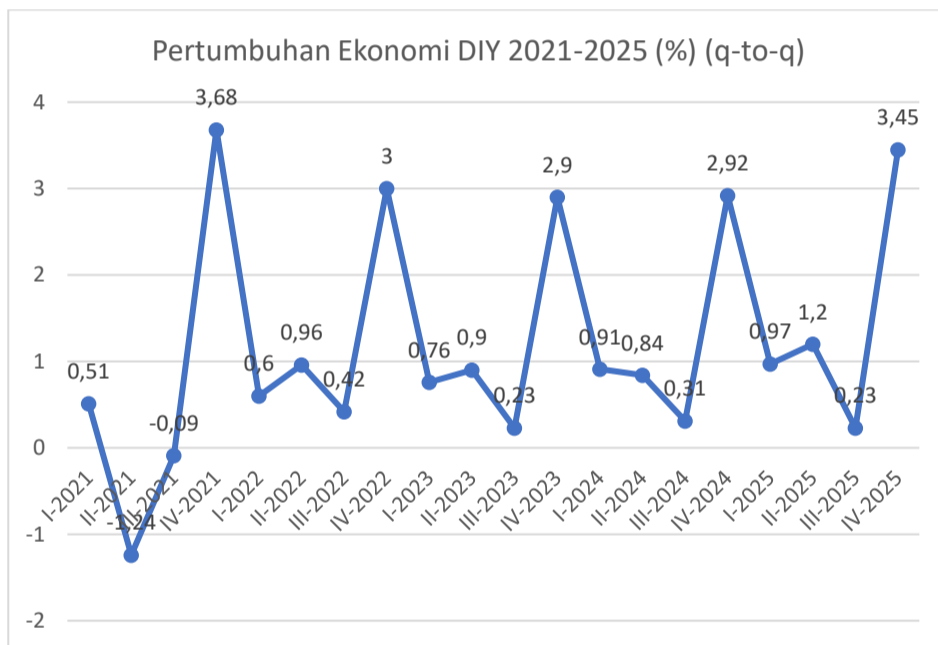
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2026

Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2021 hingga 2025 (*year on year*) dapat dilihat pada grafik berikut :



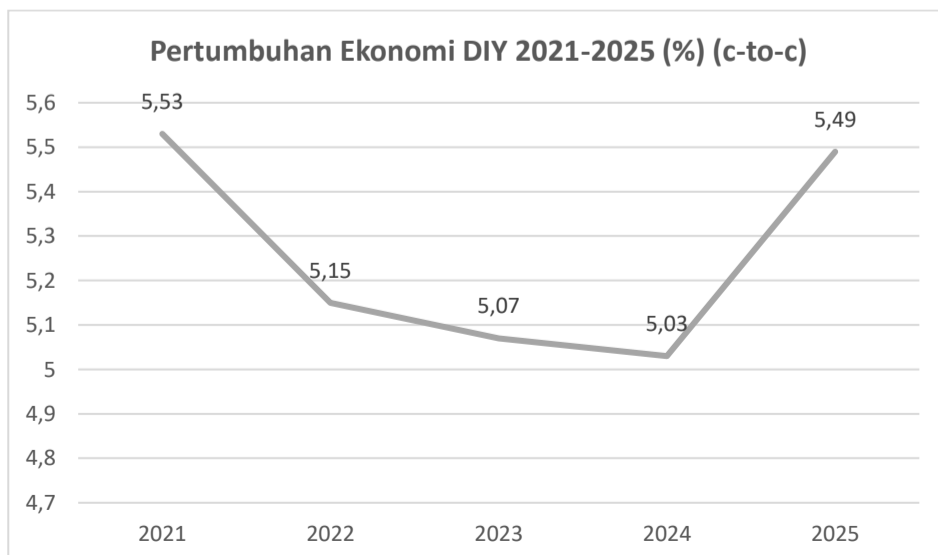
Sumber: BPS, 2026

Pertumbuhan Ekonomi DIY pada tahun 2021 hingga 2025 (*quarter to quarter*) dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2026

Dari data pertumbuhan ekonomi DIY dari 2021 hingga 2025 baik secara (*y-on-y*) maupun (*q-to-q*) dapat terlihat bahwa dinamika kinerja perekonomian DIY cukup stabil setelah tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata secara (*y-on-y*) sebesar 5,22%, dan pertumbuhan rata-rata secara (*q-to-q*) sebesar 1,17%. Hal ini juga ditunjukkan oleh data pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (*c-to-c*). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2026

Dari data pertumbuhan ekonomi *cumulative to cumulative (c-to-c)*, ekonomi DIY mulai tumbuh stabil setelah tahun 2021. Pada tahun 2021 ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,53%, kemudian menurun menjadi 5,15% pada tahun 2022, 5,07% pada tahun 2023, dan 5,03% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi *cumulative to cumulative (c-to-c)* menguat di tahun 2025 sebesar 5,49%.

5. PENDAPATAN PER KAPITA

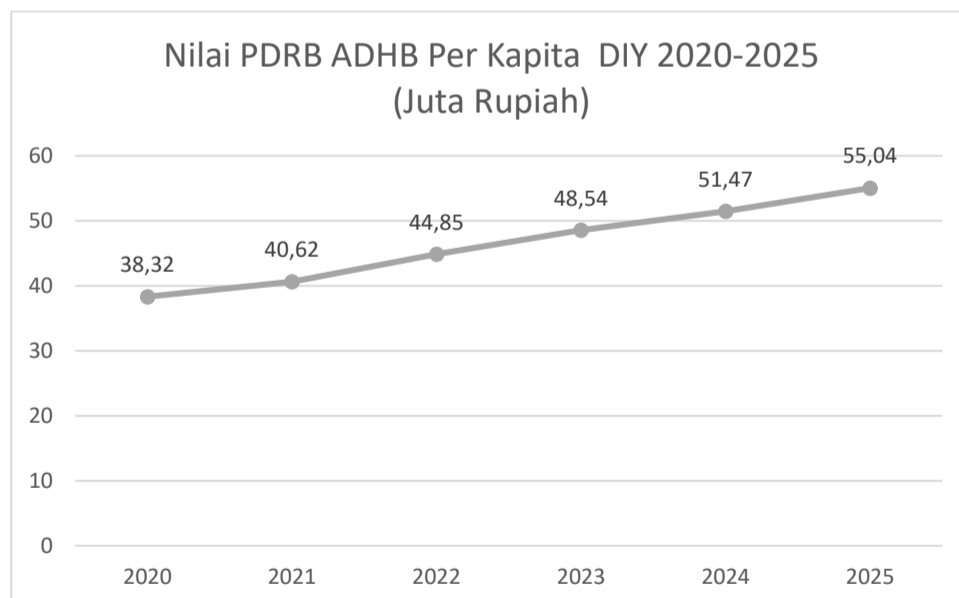
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2025 sebesar Rp. 208.133.798 juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2025 sebesar Rp. 131.435.933 juta. PDRB per kapita sesuai rilis BPS pada tahun 2025 Rp. 55,04 juta. Nilai pendapatan per kapita dihitung menggunakan PDRB ADHB. PDRB DIY berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2024-2025

Komponen	2024		2025		Laju pertumbuhan
	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	119.754.936	66.606.149	128.270.130	69.671.763	4,60
Pengeluaran Konsumsi LNPR	6.330.508	3.482.814	6.776.456	3.651.828	4,85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	28.200.606	15.158.085	29.428.145	15.389.655	1,53
Pembentukan Modal tetap Bruto	66.614.650	34.215.014	74.195.663	37.034.571	8,24
Perubahan Inventori	1.855.069	1.232.934	1.786.977	1.152.681	-
Ekspor Barang dan Jasa	98.918.399	56.195.016	103.597.210	56.560.969	0,65
Impor Barang dan Jasa	128.159.610	52.299.563	135.920.784	52.025.530	-0,52
PDRB	193.514.560	124.590.449	208.133.798	131.435.937	5,49

Sumber: BPS, 2026

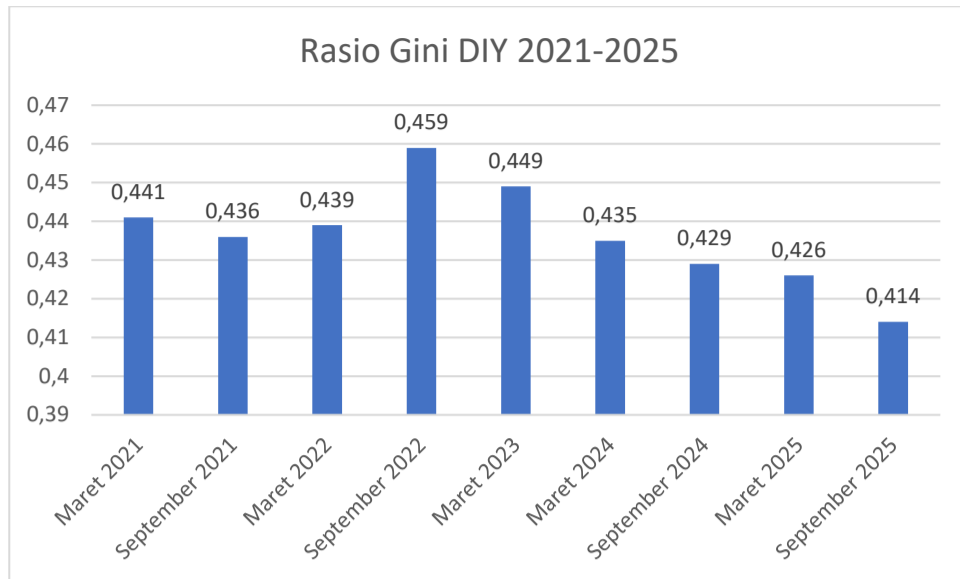
PDRB per kapita DIY (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.3,57 juta jika dibandingkan tahun 2024, yaitu dari Rp51,47 juta menjadi Rp.55,04 juta. PDRB per kapita DIY tahun 2020 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2026, diolah

6. KETIMPANGAN PENDAPATAN (INDEKS GINI)

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio gini. Rasio gini berkisar antara nol dan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini DIY pada September 2025 sebesar 0,414, mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,426. Rasio gini DIY pada tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2026, diolah

B. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

1.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan di DIY Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	97,71%	94,18% (Paket C tidak masuk dalam perhitungan)
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	83,89%	94,21%
3	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	n/a	73,50%
4	Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	n/a	67,77%

Sumber: Dinas Pendidikan DIY, 2026 (diolah)

1.2. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Anggaran Urusan Pendidikan di Pemda DIY Tahun 2025 sebesar Rp1.626.555.100.121,00 dengan realisasi sebesar Rp1.552.018.110.912,00 (95,42%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan:
 - a. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
 - b. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan kegiatan:
 - a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - b. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- 4) Penyelenggaraan urusan pendidikan juga didukung dengan dana keistimewaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yaitu Kegiatan Pendidikan Berbasis

Budaya meliputi Pembinaan Muatan Lokal, Sarana dan Prasarana Pendidikan, serta Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta. Selain itu, juga melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yaitu Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan. Melalui Dana Keistimewaan juga diberikan beasiswa sebagai berikut:

- a. Beasiswa Kartu Cerdas
 1. Beasiswa Kartu Cerdas jenjang SMA
 2. Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMK
- b. Beasiswa Retrieval (bagi anak yang mengalami putus sekolah)
 1. Beasiswa Retrieval Jenjang SMA
 2. Beasiswa Retrieval Jenjang SMK
- c. Beasiswa Inklusi

Sosialisasi dan Penyerahan Beasiswa Kartu Cerdas Jenjang SMA



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Capaian Angka Putus Sekolah penduduk usia 16-18 tahun di DIY masih di atas target yang ditetapkan. Capaian Angka Putus Sekolah adalah sebesar 0,24% sedangkan target yang ditetapkan adalah 0,19%.

2. URUSAN KESEHATAN

2.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan di DIY Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,17%	2,30%
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi paripurna	100%	100%
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%
4	Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2026 (diolah)

2.2. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran belanja Urusan Kesehatan di Pemda DIY Tahun 2025 sebesar Rp309.900.975.793,00 dengan realisasi sebesar Rp269.941.556.722,13 atau sebesar 87,11% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
 - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
 - a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);

- b. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.
- 5) Selain itu penyelenggaraan Urusan Kesehatan juga didukung dana keistimewaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yaitu Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya. Selain itu juga melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yaitu Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten serta Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang.

Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pelatihan Kader Posbindu Temon I



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Pembangunan Gedung Psikiatri Terpadu, Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik dan Pembangunan Gedung Farmasi RS Grhasia



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Pemda DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) *Multiple burden disease* dari penyakit tidak menular *degenerative*. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut data SKI tahun 2023 capaian prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular diantaranya prevalensi Diabetes Melitus di DIY 2,9% sementara angka Nasional 1,7%, untuk Hipertensi berdasarkan hasil pengukuran di DIY 30,4% dan angka nasional 29,2%, terkait kasus kanker di DIY 3,6 % dan Nasional 1,2% (sumber : SKI 2023). Diperlukan peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Tahun 2024 di DIY Jumlah estimasi keseluruhan penderita hipertensi pada tahun 2025 adalah sejumlah 55.228 penderita, Jumlah penemuan kasus Diare tahun 2025 di semua umur sejumlah 46.221 kasus;
- 2) Belum optimalnya perencanaan dan pengumpulan data pada struktur pendataan dan sistem Manajemen data yang belum konsisten sehingga menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sasaran;
- 3) Penyakit menular infeksi dan infeksi baru (*re-emerging and new emerging disease*) serta potensi kejadian luar biasa. Jumlah kasus TB yang ditemukan tahun 2025 mencapai 6380 kasus, Tahun 2025 Jumlah kasus baru HIV mencapai 721 orang sedang ODHA ARV sebesar 60%, dan Insiden rate kasus DBD tahun 2025 mencapai 51,19 per 100.000 penduduk;
- 4) Angka *Stunting* masih cukup tinggi. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus. Sesuai dengan Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%). Pada tahun 2025 prevalensi *stunting* di DIY mencapai 9,69%;
- 5) Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Tahun 2025 kematian ibu terjadi sebanyak 28 kasus yang disebabkan oleh Perdarahan 5 kasus, Gangguan Hipertensi 6, Infeksi 5, komplikasi *obstetric* 3, dan Komplikasi *non obstetric* 9;

- 6) Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2025 jumlah Balita Gizi Buruk di DIY mencapai 0,127 (Sumber : Dinkes DIY). Angka menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi balita gizi kurang di DIY belum tercapai secara maksimal;
- 7) Angka kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Tahun 2025 kematian bayi terjadi sebanyak 227 kasus;
- 8) Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	n/a	75,76%
2	Tingkat kemantapan jalan provinsi	68,04%	69,78%
3	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan Mitigasi banjir	n/a	Tidak ada wilayah sungai kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)
4	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	100%	100%
5	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestic oleh SPALD Regional	n/a	100%
6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	n/a	100%
7	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	n/a	Untuk pengajuan aktifitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sudah diterbitkan atau menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2025 tidak ada pengajuan yang dilakukan. Penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan provinsi terbaru terbit pada tahun 2024, yaitu berupa permohonan KKPR pembangunan Jembatan Pandansimo seluas 17.649,33 m ² oleh Dinas PUPESDM DIY.

Sumber: Dinas PUESDM DIY, 2025 (diolah)

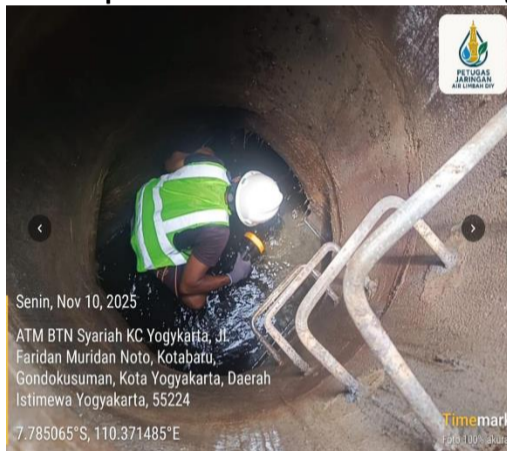
3.2. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Urusan Pekerjaan Umum di Pemda DIY Tahun 2025 sebesar Rp367.908.011.311,00 dengan realisasi sebesar Rp345.789.637.320 (93,99%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan:

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi;
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
- 7) Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
- 9) Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum juga didukung Dana Keistimewaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yaitu Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Operasi dan Pemeliharaan IPAL Regional Sewon Tahun 2025



Sumber: Balai PALPJK, Dinas PUPESDM DIY, 2026

Gambar Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari – Klepu, Kulon Progo Tahun 2025



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

Gambar Pekerjaan Saluran Drainase dan Pembangunan Jalan Ruas Prambanan - Gayamharjo segmen B4 dan B5 Tahun 2025



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

3.3. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Urusan Pekerjaan Umum di Pemda DIY Tahun 2025 sebesar Rp367.908.011.311,00 dengan realisasi sebesar Rp345.789.637.320 (93,99%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan:
 - c. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;
- 12) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 13) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- 14) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi;
- 15) Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
- 16) Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- 17) Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan:
 - c. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
 - d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
- 18) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

3.4. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Pemda DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan Server dari Web Klinik Konstruksi dikarenakan server merupakan server bersama dari Dinas Kominfo, sehingga server terkadang mengalami gangguan;
- 2) Perlu penambahan jumlah alat pengujian, sehingga proses pengujian lebih efisien;
- 3) Umur infrastruktur SDA mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi infrastruktur;
- 4) Faktor Kondisi Geologi bawah tanah yang tidak mudah diprediksi melalui pengukuran geofisika dengan alat geolistrik untuk mengetahui keberadaan akuifer lapisan tanah yang mengandung air kurang/tidak tepat sehingga dimungkinkan berpindah lokasi setelah dilaksanakan pengeboran;
- 5) Faktor cuaca seperti hujan ekstrem membuat umur bangunan konstruksi lebih pendek dari rencana;
- 6) Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi;
- 7) Beberapa ruas jalan provinsi dilalui kendaraan pengangkut material tambang sehingga membuat beberapa ruas jalan tersebut lebih cepat mengalami kerusakan;
- 8) Pompa intake kebon agung eksisting sebanyak 4-unit mengalami rusak total (mati);
- 9) Kurangnya informasi data pendukung dari pemohon rekomendasi teknis.

4. URUSAN PENATAAN RUANG

Capaian kinerja urusan penataan umum yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2024-2025

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian	n/a	Untuk pengajuan aktifitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sudah diterbitkan

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi		atau menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2025 tidak ada pengajuan yang dilakukan. Penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan provinsi terbaru terbit pada tahun 2024, yaitu berupa permohonan KKPR pembangunan Jembatan Pandansimo seluas 17.649,33 m ² oleh Dinas PUPESDM DIY.

Sumber: Dinas PUESDM DIY, 2025 (diolah)

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2025 serta Terhadap Target Akhir RPJMD DIY (2027)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD DIY 2027	Capaian 2025 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	82,27	83,91	88,22	105,13	90,74	95,49

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026

Permasalahan yang dihadapi:

- 1) Implementasi penerbitan sanksi hasil dari audit tata ruang belum optimal karena masih menunggu pelaksanaan audit tata ruang serta penetapan juknis pemberian insentif dan disinsentif sebagai pelaksanaan Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2023;
- 2) Masih terdapat materi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang belum ditetapkan;
- 3) Pemanfaatan Data dan informasi pertanahan dan tata ruang belum terintegrasi dengan optimal;
- 4) Dokumen Perencanaan Tata Ruang pada satuan ruang strategis berupa Rencana induk belum ditetapkan menjadi peraturan Gubernur;
- 5) Dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi sektor dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

5. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DIY Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak ada bencana, tidak ada penanganan rumah layak huni bagi warga korban bencana	Tidak ada bencana, tidak ada penanganan rumah layak huni bagi warga korban bencana
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Tidak ada relokasi, tidak ada program pemerintah yang mengharuskan warga negara direlokasi
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	8,19 %	Tidak ada penanganan Kawasan kumuh di tahun 2025, tidak ada target Kawasan kumuh yang ditangani di tahun 2025. Capaian sudah melebihi target akhir di RPJMD DIY

Sumber: Dinas PUESDM DIY, 2025 (diolah)

5.2. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Anggaran belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Pemda DIY Tahun 2025 sebesar Rp7.839.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.635.209.206,00 (97,39%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:
 - a. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi;
 - b. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi;

- 2) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman;
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
- 3) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya, melalui BKK Arsitektur Khas Yogyakarta dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dengan memfasilitasi masyarakat miskin sehingga memiliki rumah layak huni dengan turut serta melestarikan desain rumah dengan desain arsitektur tradisional yang merupakan ciri budaya Jawa Yogyakarta.

Terbangunnya Rumah Layak Huni melalui BKK Arsitektur Khas Yogyakarta



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2026

5..3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Pemda DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya insentif/skema untuk mengembangkan hunian Vertikal di perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat miskin;
- 2) Harga lahan yang mahal untuk pembangunan perumahan MBR dan masyarakat miskin;
- 3) Pendataan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten / Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid;
- 4) Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi;
- 5) Pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di kalurahan/kelurahan belum dapat diukur dengan baik;
- 6) Masyarakat yang tinggal di KRB III, masih belum memiliki kesadaran penuh untuk relokasi dari KRB III, dengan pertimbangan utama adalah perekonomian / mata pencaharian.

6. URUSAN TRAMTIBUMLINMAS

6.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Tramtibumlinmas yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Tramtibumlinmas di DIY Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100%	100%
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
4	Persentase penanganan pra bencana	100 %	100 %
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	100 %
6	Persentase penanganan pasca bencana	n/a	100%

Sumber: Satpol PP DIY, 2026 (diolah)

6.2. Realisasi Belanja Urusan Tramtibumlinmas

Anggaran Pelayanan Tramtibumlinmas di Satpol PP DIY Tahun 2025 sebesar Rp28.523.332.225,00 dengan realisasi sebesar Rp26.929.056.354,00 (94,41%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
 - b. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- c. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - e. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - f. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- 2) Selain itu urusan Trantibumlinmas juga didukung Dana Keistimewaan melalui Program Urusan Pertanahan yaitu Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, juga melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yaitu Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, serta Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan.



**Penertiban Tanah Kas Desa di Selomartani
Kabupaten Sleman**



**Pembersihan Pamflet Ujaran Kebencian di Sekitar
Wilayah Kepatihan**

Anggaran sub urusan Bencana dan Kebakaran di BPBD DIY Tahun 2025 sebesar Rp18.982.338.665,00 dengan realisasi sebesar Rp16.319.483.297,00 (85,97%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Penanggulangan Bencana
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi;
 - b. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
 - c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - d. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - e. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - f. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
 - g. Penanganan Pasca Bencana Provinsi;
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran: Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 3) Selain itu urusan Bencana juga didukung Dana Keistimewaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yaitu Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya.

6.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk pelayanan Trantibumlinmas di Pemda DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin. Selama tahun 2025, Satpol PP DIY berhasil melakukan penindakan terhadap 100 titik tanah desa yang tidak memiliki ijin atau disalahgunakan ijinnya;
- 2) Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun warga pendatang yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan, maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai, dan peredaran minuman keras beralkohol yang tidak terkendali;
- 3) Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia *silver* dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi untuk sub urusan bencana dan kebakaran di Pemda DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan bencana belum optimal karena tingginya kebutuhan dan isu lintas kabupaten/kota yang memerlukan sinergi wilayah, koordinasi, manajemen risiko, dan penganggaran masih bersifat reaktif sehingga penanggulangan bencana cenderung lambat;
- 2) Penanggulangan dan penanganan pasca bencana belum optimal karena keterbatasan BPBD DIY/BPBD Kab/Kota dalam bekerja sendiri, masih kurangnya koordinasi rutin lintas OPD serta belum terintegrasinya

proses identifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga berpotensi menghambat pemulihan wilayah terdampak.

7. URUSAN SOSIAL

7.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Sosial di DIY Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	n/a	100%

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2026 (diolah)

7.2. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Anggaran urusan sosial di Pemda DIY Tahun 2025 sebesar Rp115.246.481.035,00 dengan realisasi sebesar Rp108.226.622.842,00 (93,91%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan:
 - a. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi;
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
 - c. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
 - d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- 3) Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan:
 - a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
- 5) Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan: Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
- 7) Selain itu urusan Sosial juga didukung Dana Keistimewaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yaitu Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya juga melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yaitu Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan.

Foto-Foto Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sosial di DIY Tahun 2025



Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

7.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Pemda DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, rentan sosial, dan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menghadapi risiko tidak dapat melanjutkan pendidikan formal secara berkesinambungan. Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, minimnya dukungan dan pendampingan dari orang tua, serta berbagai faktor sosial lainnya berdampak pada terjadinya putus sekolah, ketertinggalan capaian pembelajaran, maupun terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Apabila tidak ditangani secara terpadu, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan lintas generasi;
- 2) Sering dijumpai permasalahan anak dan keluarga yang bersifat kompleks dan saling terkait, meliputi kerentanan sosial ekonomi, permasalahan pengasuhan, serta risiko kekerasan dan penelantaran anak. Penanganan kasus anak dan keluarga memerlukan pendekatan lintas layanan yang terintegrasi, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam kesinambungan pendampingan dan keterpaduan intervensi antar pemangku kepentingan;
- 3) DIY merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu aktivitas sosial ekonomi, serta menimbulkan kerugian materiil maupun nonmateriil apabila tidak diantisipasi secara memadai.

C. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

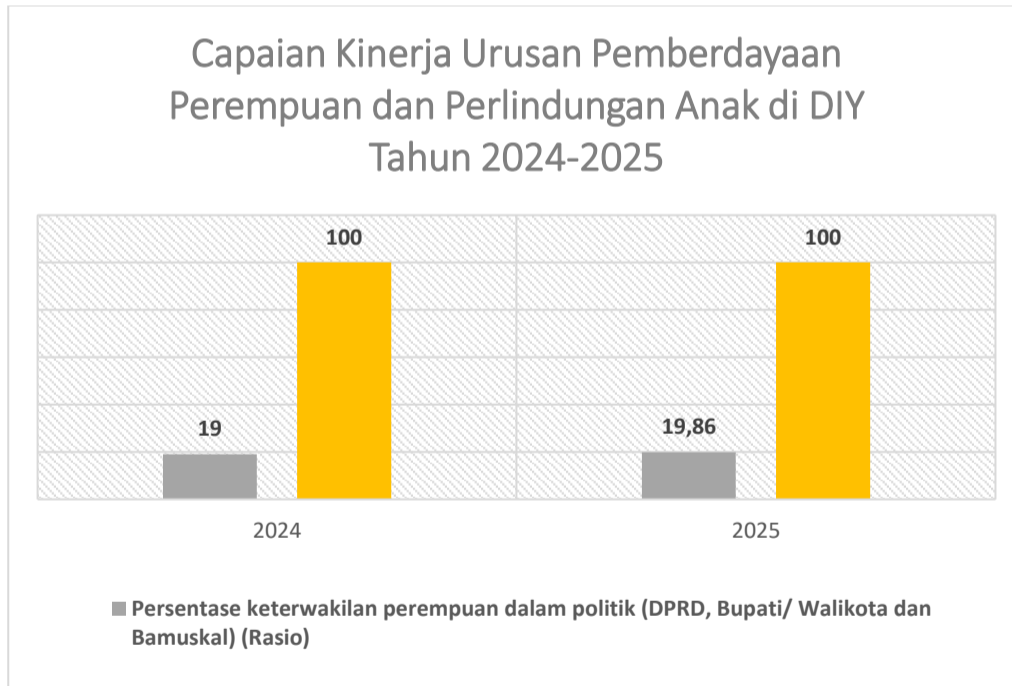
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2024	2025			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target*	Realisasi	Persentase (%)		
1	Tingkat produktivitas DIY	Juta/Tenaga Kerja	57,08	57,51	59,66	103,74	62,45	95,53
2	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	75	75	75,31	100,43	75	100,43
3	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	68	70	71	101,29	80	88,75
4	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	87	70	73	104,29	75	97,33
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	2630	2639	2644	100,19	2659	99,43
6	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	2750	2768	2770	100,07	2808	98,64

Ket: *Target Penyelarasan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2026

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sumber: DP3AP2 DIY, 2026

Progress Pangarusutamaan Gender Sampai Dengan Tahun 2025

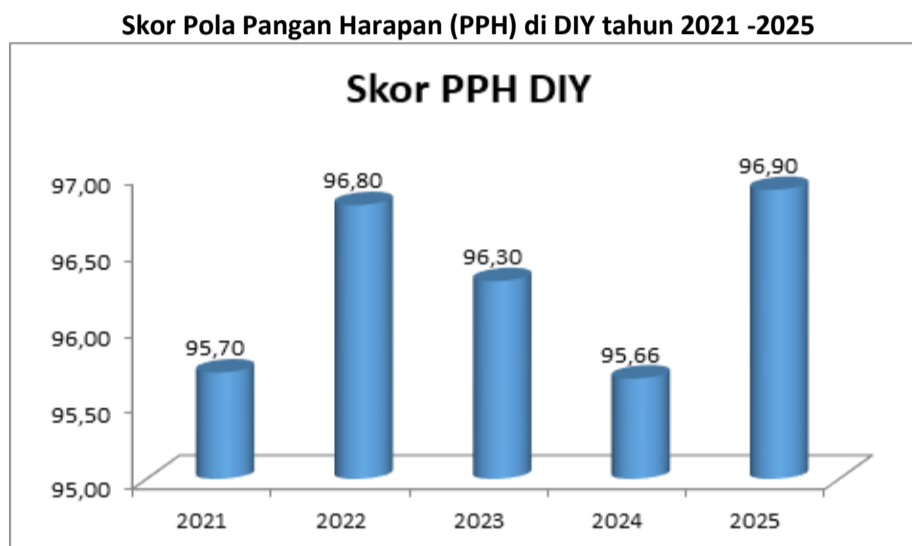
Aspek	Indikator	Capaian 2025	Keterangan
Kelembagaan	Jumlah perangkat daerah dengan <i>Gender Focal Point</i> aktif	37 dari 37 OPD	Implementasi GAB dan peningkatan kualitas
Anggaran Responsif Gender	Persentase program dengan Analisis Gender (GAB)	66,84%	Sesuai target Surat Edaran Sekretaris Daerah
Data dan Monitoring	OPD dengan data terpilah gender lengkap	20 OPD	Penguatan data terpilah melalui DATAKU Bapperida

Aspek	Indikator	Capaian 2025	Keterangan
Kapasitas SDM	ASN terlatih PUG dan ARG	65%	Persentase dari SDM perencana, pelaksana, dan pengawas
Partisipasi	Keterlibatan organisasi perempuan dalam program pembangunan	75%	Perlu perluasan dan penguatan kemitraan

Sumber: DP3AP2 DIY, 2026

3. URUSAN PANGAN

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator penilaian konsumsi pangan secara kualitatif. Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi berbagai kelompok pangan. Semakin tinggi skor PPH suatu wilayah menunjukkan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi, hal ini mengindikasikan semakin tingginya kualitas konsumsi pangan masyarakat.



Sumber data: BPS Provinsi DIY diolah oleh Bapanas dan DPKP DIY, 2025

Perhitungan Skor PPH didasarkan pada data SUSENAS dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2025, capaian PPH sebesar 96,90, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 95,66. Perkembangan ini didorong oleh perubahan pola konsumsi yang lebih seimbang, seperti penurunan konsumsi beras dari 55,79% menjadi 48,10% (mendekati target 50%), peningkatan konsumsi umbi-umbian dari 2,29% menjadi 2,8%, serta kenaikan konsumsi kacang-kacangan dari 3,23% menjadi 4,70%. Perubahan ini selaras dengan kebijakan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan mendorong konsumsi pangan lokal.

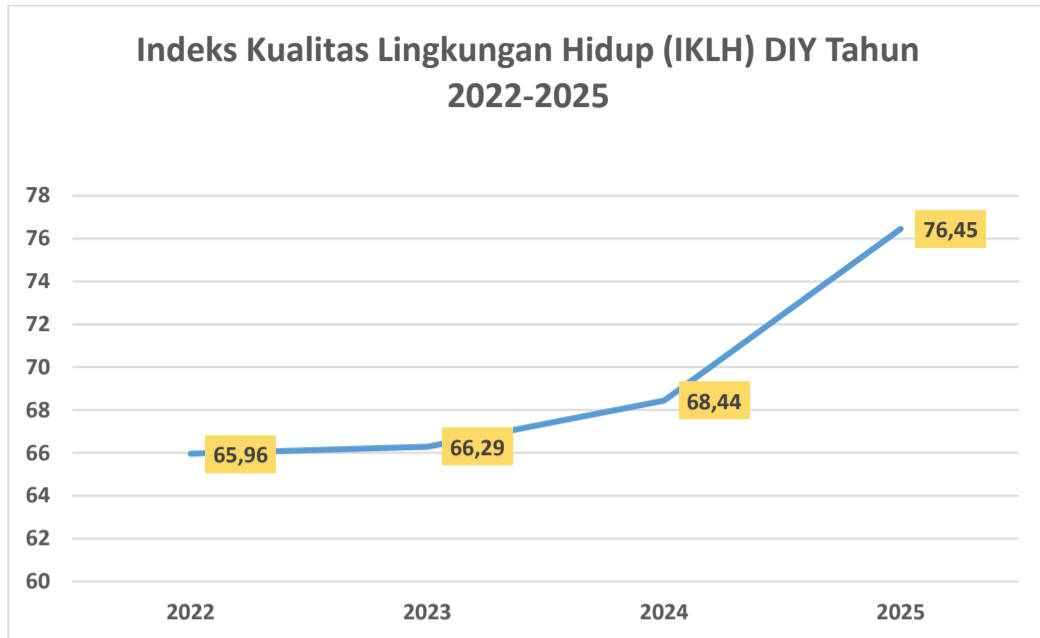
Skor PPH nasional saat ini berada di angka 95,1, yang berarti Skor PPH DIY telah melampaui rata-rata nasional. Prestasi ini didukung oleh penghargaan sebagai provinsi dengan PPH tertinggi se-Indonesia dari 2018 hingga 2024. Tahun 2025, DIY menempati posisi kedua PPH terbaik nasional untuk tingkat provinsi setelah Jawa Tengah. Upaya ini didukung oleh program penganeekaragaman pangan B2SA melalui kampanye, gerakan, edukasi, promosi, dan sosialisasi. Ke depannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan yang masih belum mencapai angka ideal, antara lain dengan mendorong konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan, serta mempertahankan konsumsi padi-padian, protein hewani, dan sayur buah.

4. URUSAN PERTANAHAN



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2026 (diolah)

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP



Sumber: DLHK DIY, 2026 (diolah)

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target*	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	%	27,14	25,34	28,08	110,81	26,50	105,96
Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	%	5,49	6,03	5,92	98,17	5,86	98,98

Ket: *Target Penyelarasan
 Sumber: DLHK DIY, 2026

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Target dan Realisasi Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022-2027 (%)	Capaian 2025 Terhadap Target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*	Realisasi	%		
Nilai Kinerja Administrasi Kependudukan Pemda DIY	Nilai	86,25	87,50	87,50	100	88,50	98,87
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, KIA, dan akta kematian)	%	96,89	97,20	97,20	100	94,15	102,91

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2022-2027 (%)	Capaian 2025 Terhadap Target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*	Realisasi	%		
Persentase kepemilikan dokumen status perkawinan	%	87,74	88,19	88,52	100,37	89.09	99,36

Ket: * Target Penyelesaian
 Sumber: DPMKKPS DIY, 2026

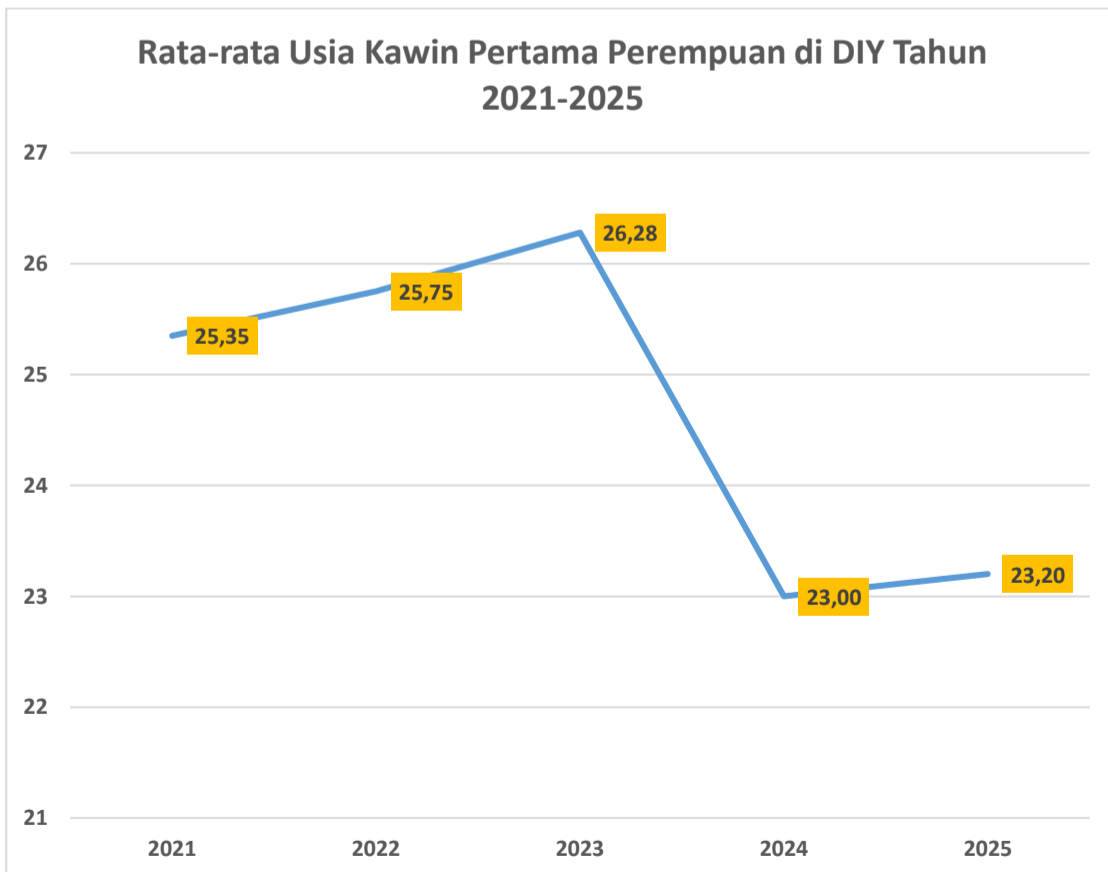
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DIY Tahun 2025

Indikator Sasaran	2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) (%)
		Target*	Realisasi	Realisasi (%)		
Lembaga Kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan	4	4	4	100	4	100
Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Desa	133,3	133,4	133,4	100	133,6	99,85
Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa	70,5	70,6	70,6	100	70,8	99,71
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	12	10	10	100	32	100

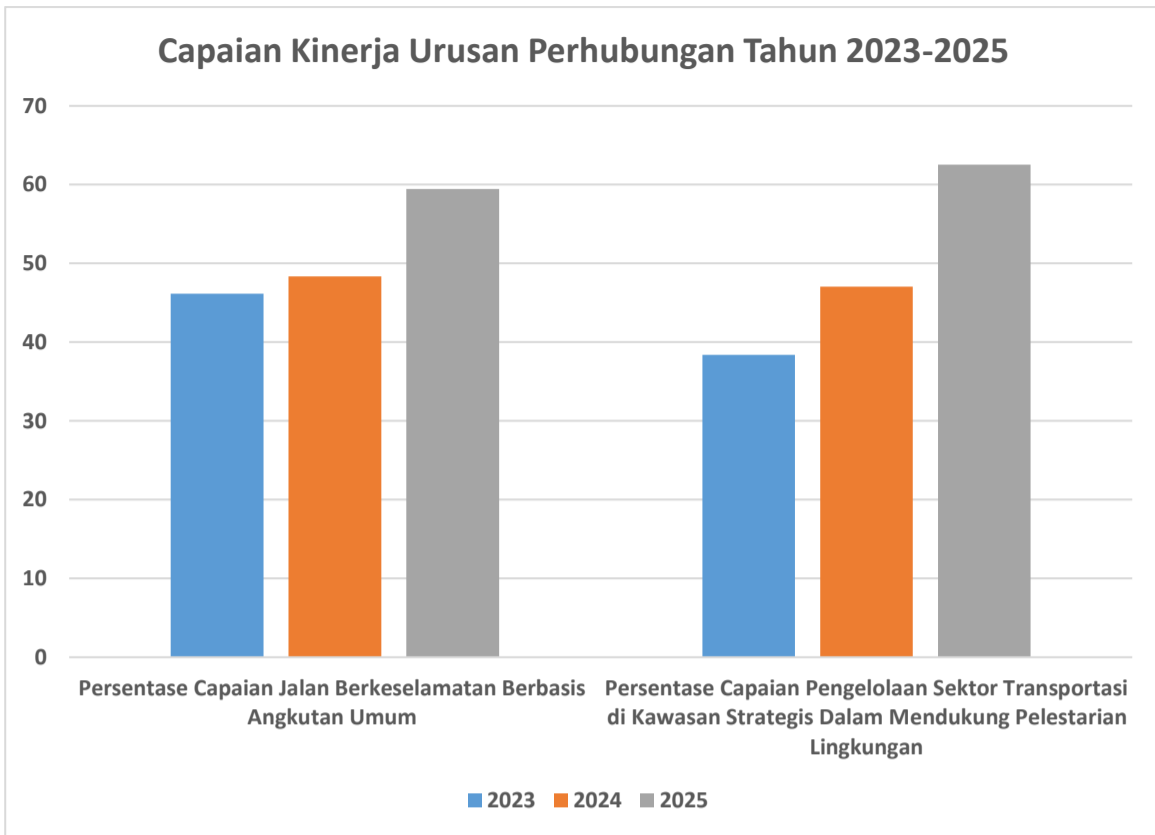
Ket: *Target Penyelesaian
 Sumber: DPMKKPS DIY, 2026

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB)



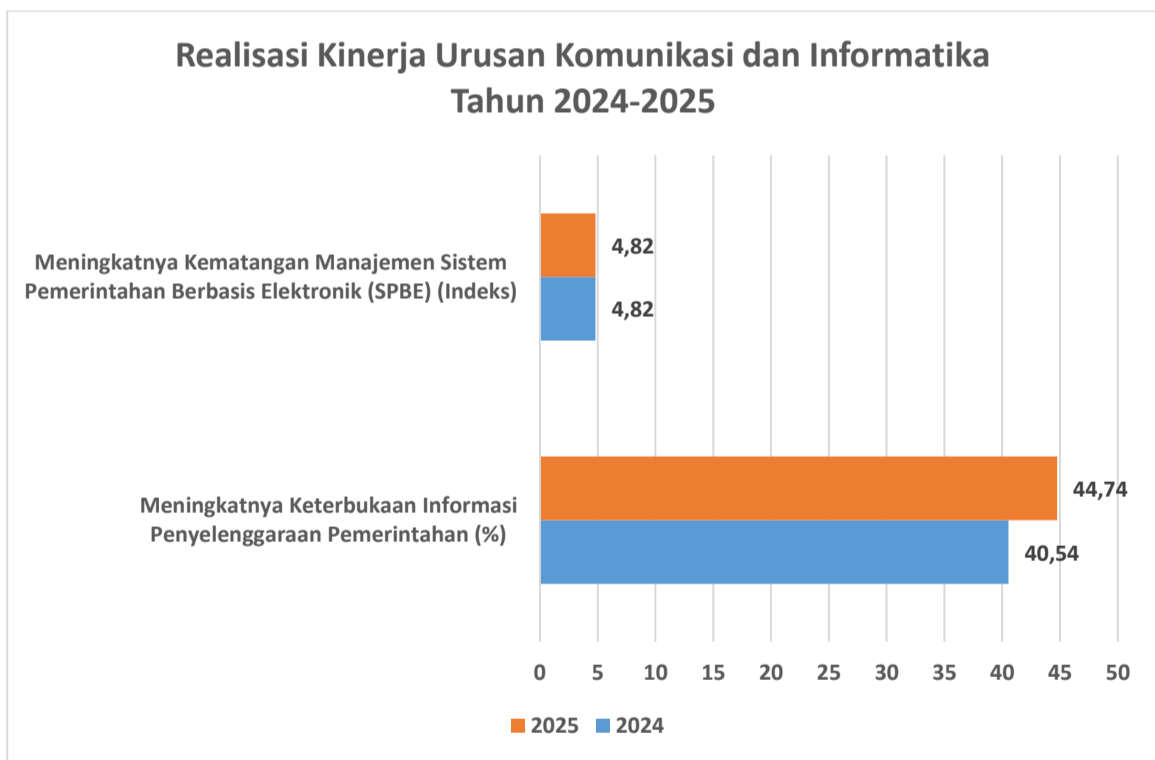
Sumber: DP3AP2 DIY, 2026 (diolah)

9. URUSAN PERHUBUNGAN



Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2026 (diolah)

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2026 (diolah)

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Koperasi Aktif	1.734	1.672	2.260
2	Koperasi Pasif	352	402	333
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	2.020.705	2.011.159	1.710.922,78
4	Modal Luar (Rp Juta)	3.363.762	4.078.110	3.122.001,46
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.867.928	5.585.240	4.118.772,77

No	Uraian	2023	2024	2025
6	Koperasi Primer	2.049	2.036	2.139
7	Koperasi Sekunder	37	38	35

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 31 Desember 2025

Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2021-2025

No	Skala Usaha	2023	2024	2025
1	Usaha Mikro	324.408	327.774	329.487
2	Usaha Kecil	16.069	16.076	16.126
3	Usaha Menengah	2.109	2.130	2.131
Jumlah		342.586	345.980	347.744

Sumber: Aplikasi SiBakul Jogja Dinas Koperasi dan UKM DIY, 31 Desember 2025

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Perkembangan Investasi Kumulatif di DIY Tahun 2021-2025

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth
s.d 2021	22.692.647.593	9.803.584.510	32.496.232.103	3.078.892.969	10,46 %
s.d 2022	24.967.647.193	11.437.953.245	36.405.600.439	3.909.367.815	12,00%
s.d 2023	29.983.131.093	12.118.877.347	42.102.008.440	5.696.408.001	16,00%
s.d 2024	33.613.380.215	12.650.518.313	46.263.898.528	4.161.890.088	10,00%
s.d 2025	40.384.043.536	14.317.571.345	54.701.614.881	8.437.716.353	18,20%

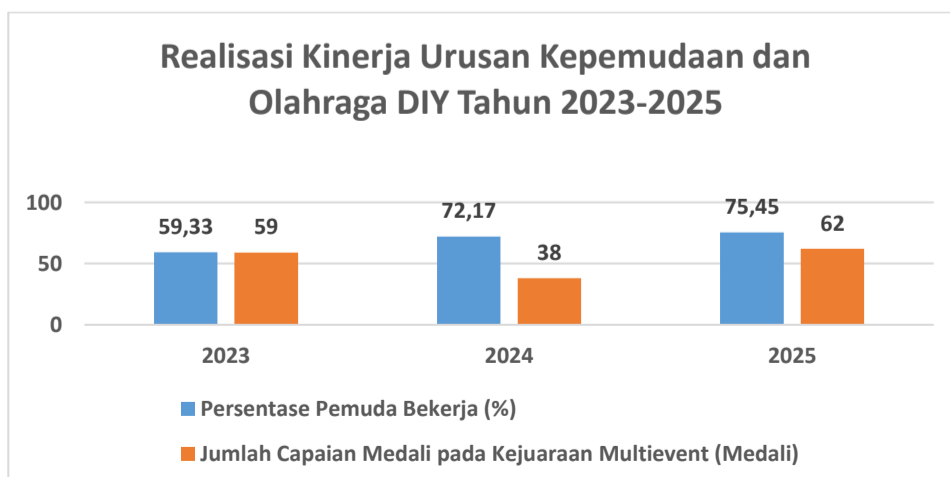
Sumber: DPMPTSP DIY, 2026

Perkembangan Investasi Total PMA+PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2021 – 2025 (dalam rupiah)

KAB/KOTA	2023	2024	2025
KAB.BANTUL	687.291.289.577	727.123.007.671	754.866.711.055
KAB.GUNUNG-KIDUL	192.264.077.359	83.614.379.9323	157.247.320.860
KAB.KULON PROGO	242.386.898.531	192.017.314.638	527.160.044.629
KAB.SLEMAN	3.647.986.885.097	2.291.437.554.489	4.807.950.295.325
KOTA YOGYAKARTA	926.478.850.857	867.697.831.146	2.190.491.981.313
TOTAL	5.696.408.001.422	4.161.890.087.878	8.437.716.353.182

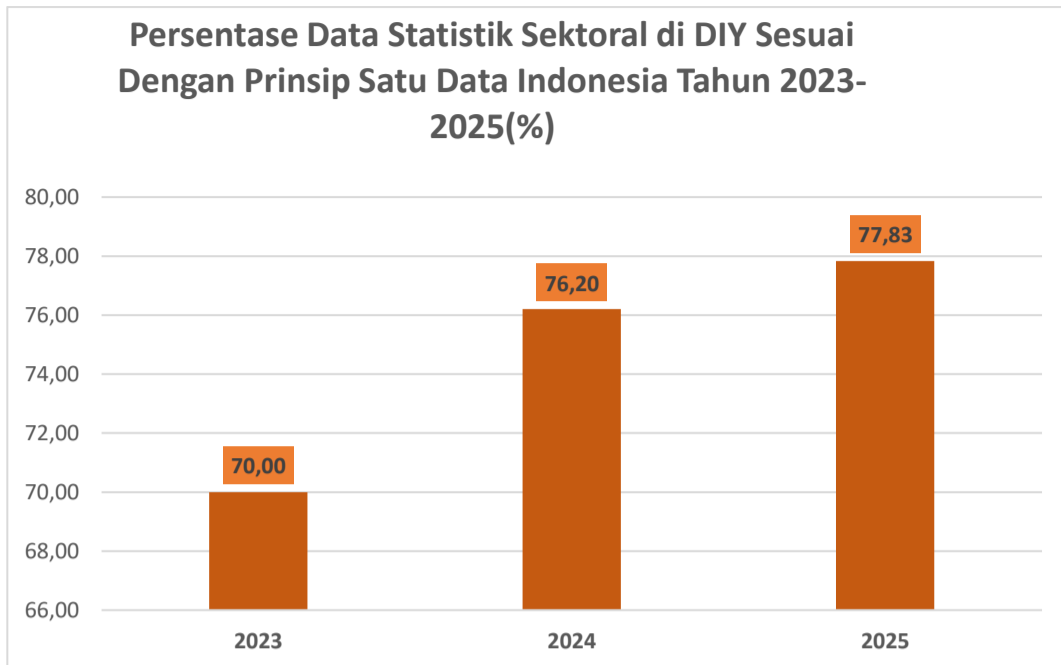
Sumber: DPMPTSP DIY, 2026

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



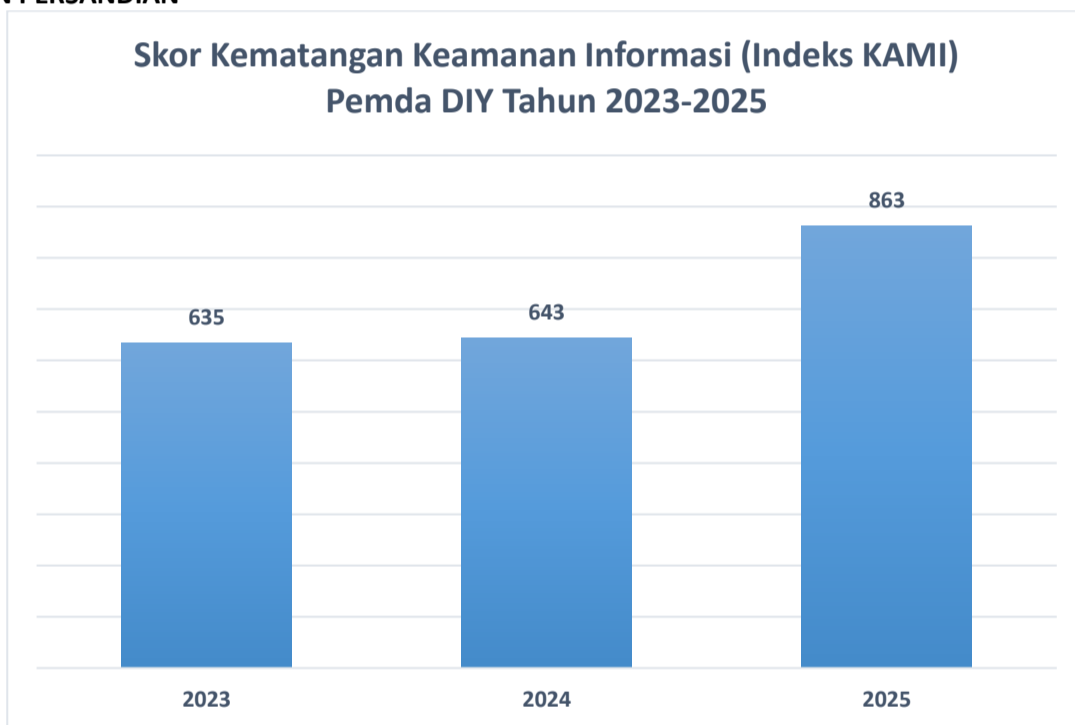
Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2026 (diolah)

14. URUSAN STATISTIK



Sumber: Bapperida DIY, 2026 (diolah)

15. URUSAN PERSANDIAN



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2026 (diolah)

16. URUSAN KEBUDAYAAN



Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026 (diolah)

Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya Dan Museum s.d Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Peningkatan kinerja sejarah bahasa dan permuseuman sampai dengan 2025	918 buah
2	Peningkatan kinerja Cagar budaya yang ditetapkan sampai dengan 2025	802 buah
3	Warisan Budaya yang ditetapkan sampai dengan 2025	245 buah
Jumlah		1.965 buah

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Pada Tanggal 15 - 16 Desember 2025 Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyerahkan sertifikat penetapan budaya secara nasional. Pemerintah Daerah DIY menorehkan prestasi dengan menerima 33 Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dan 28 Sertifikat Cagar Budaya Nasional. Atas capaian ini, DIY dinobatkan sebagai Daerah dengan Jumlah Penetapan Cagar Budaya Nasional Terbanyak Tahun 2025.

Dokumentasi Penerimaan sertifikat WBTb dan Cagar Budaya Nasional Tahun 2025



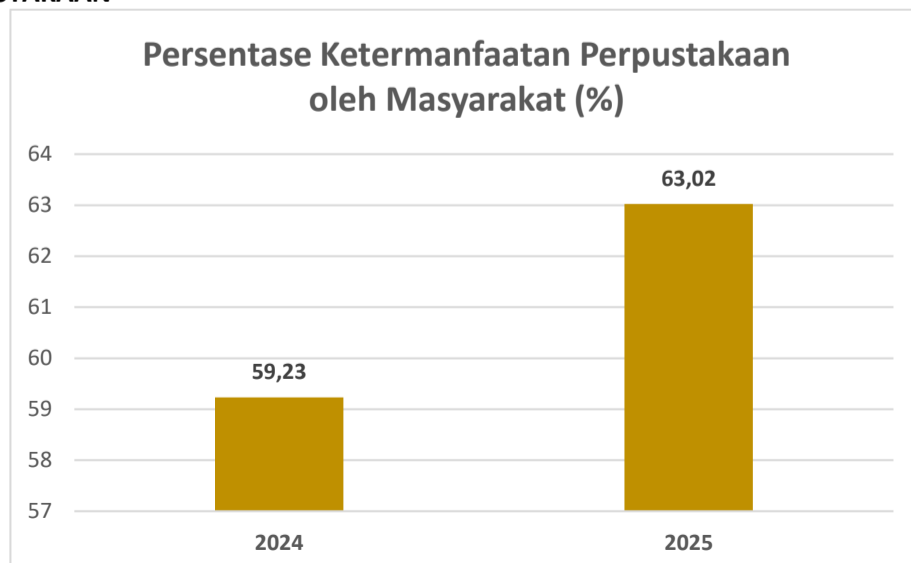
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya dan Tradisi di DIY Pada Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah kegiatan Fasilitasi Upacara Adat dan Tradisi	14 lembaga
3	Jumlah Pembinaan Sanggar	50 Sanggar/Lembaga
4	Jumlah Pembinaan Kelompok Seni melalui Fasilitas kegiatan seni	233 Kelompok Seni / Lembaga
5	Jumlah Pembinaan Kelompok Seni melalui Pemberian Hibah sarana dan Prasarana seni	19 kelompok/Lembaga
6	Jumlah Pembinaan terhadap kelompok penghayat kepercayaan	27 kelompok/lembaga
7	Jumlah Pembinaan Kelompok Seni melalui Festival Kebudayaan Yogyakarta	55 Kelompok/Lembaga
Jumlah		398 Lembaga

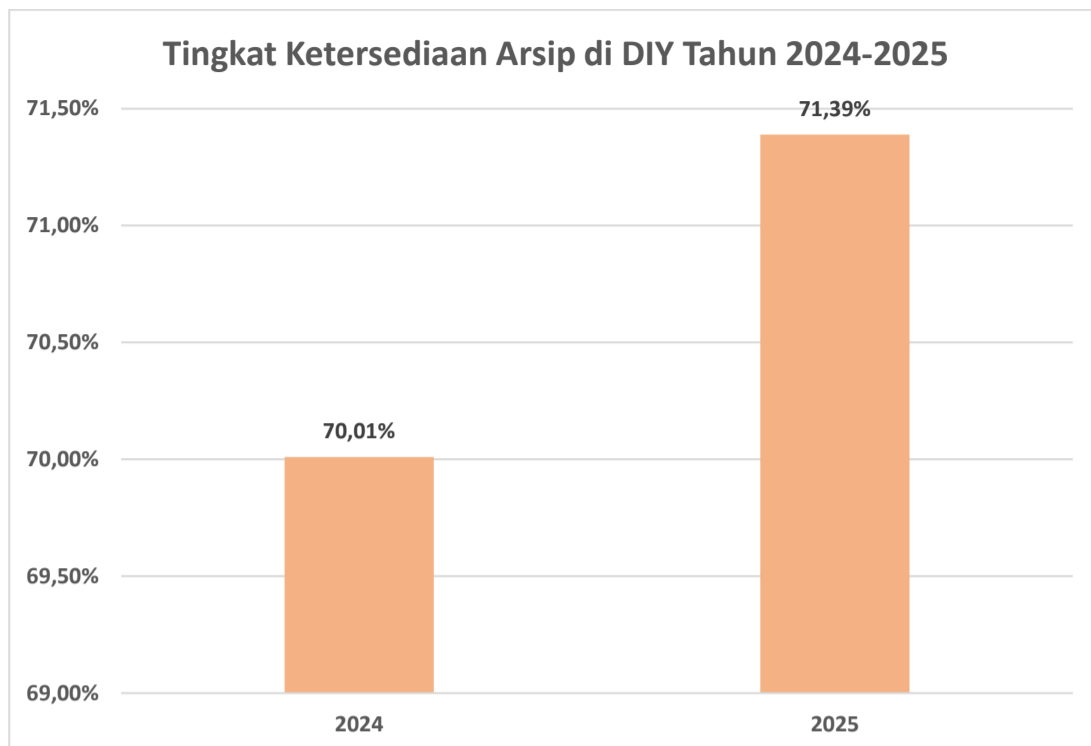
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2026

17. URUSAN PERPUSTAKAAN



Sumber: DPAD DIY, 2025 (diolah)

18. URUSAN KEARSIPAN



Sumber: DPAD DIY, 2026 (diolah)

D. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

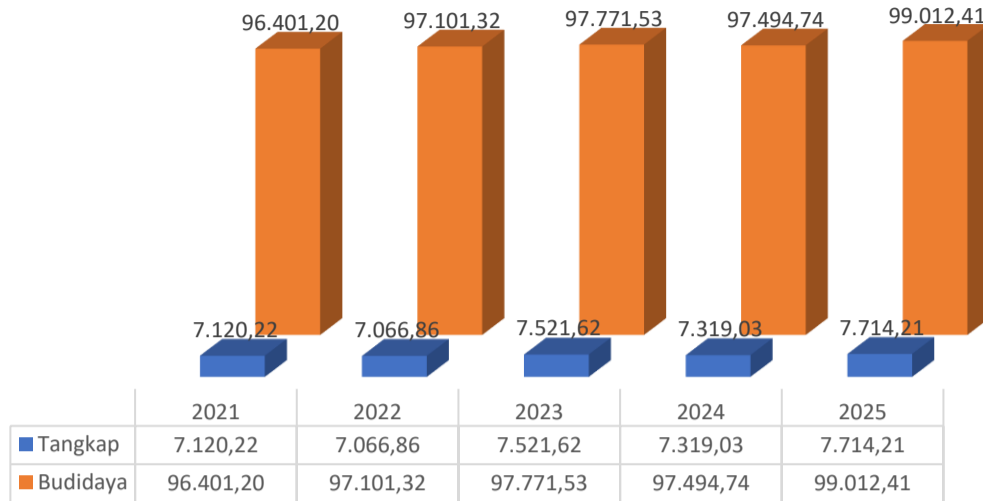
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*	Realisasi	% Realisasi		
Tujuan							
Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	351,67	371.350	367,66	99,01	378.714	97,08
Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)	Skor	58,76	46,39	61,62	132,83	51,27	120,19
Jumlah pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin dalam 1 tahun	Juta Rupiah	39,60	37,00	38,60	104,32	39,00	94,87
Sasaran							
Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap	Juta Rupiah	2.745.013	2.421.104	2.735.686	112,99	2.669.267	102,49
Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Skor	97,16	97,17	9975	102,65	97,19	102,63
Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan	Ha	5.670,87	5.822,92	5.822,92	100,00	5.822,92	100,00
nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin	Juta Rupiah	198,00	186,00	193,00	103,76	188,00	102,66

Ket: *Target Penyelesaian

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2026

Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2020 – 2025



■ Tangkap ■ Budidaya

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2026

Produksi Perikanan Budidaya di DIY Tahun 2024-2025

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	
		2024	2025
1	Lele	47.451,48	48.445,21
2	Nila	33.510,30	34.387,52
3	Gurame	4.780,12	6.238,82
4	Bawal Air Tawar	3.928,23	4.531,18
5	Udang Galah	4.088,80	3.697,51
6	Udang Vaname	2.660,14	579,88
7	Mas	652,83	637,26
8	Patin	301,26	346,70
9	Tawes	105,01	131,72
10	Gabus	16,58	16,61
Total		97.494,74	99.012,41

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2026

Produksi Perikanan Tangkap Laut di DIY Tahun 2024-2025

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	
		2024	2025
1	Tongkol	1.584,33	932,34
2	Layur	455,29	806,41
3	Manyung	118,26	497,20
4	Layang Benggol	385,68	437,54
5	Kembung	379,01	346,16
6	Cakalang	627,13	326,49
7	Lidah	92,87	264,59
8	Belanak	105,23	139,75
9	Tuna	185,58	147,10
10	Ikan Jenis Lainnya	1.430,34	1.850,04
Total		5.363,72	5.747,62

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2026

Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat di DIY Tahun 2024-2025

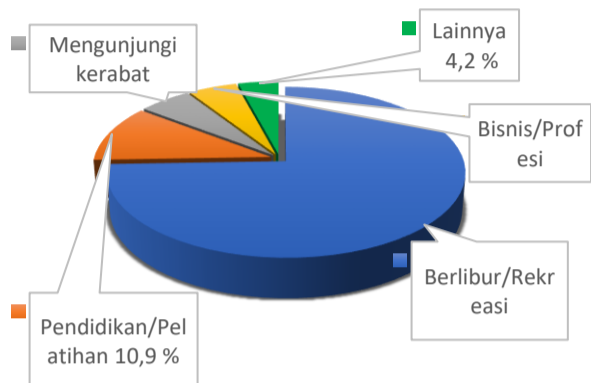
No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	
		2024	2025
1	Tawes	237,68	249,94
2	Nila	224,55	224,74
3	Sidat	164,74	127,15
4	Keting	137,59	137,06
5	Mas	132,73	138,27
6	Lele	122,91	124,76
7	Gabus	122,16	137,05

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	
		2024	2025
8	Jelawat	114,57	115,53
9	Mujahir	107,43	101,64
10	Ikan Jenis Lainnya	624,70	610,45
Total		1.989,06	1.966,59

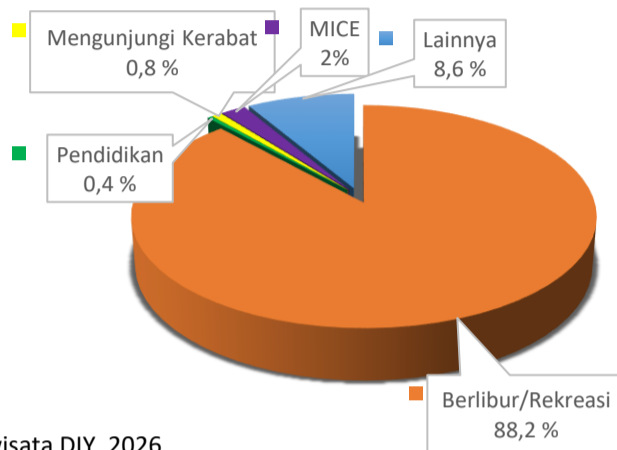
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2026

2. URUSAN PARIWISATA

Minat Wisatawan Nusantara Mengunjungi DIY Tahun 2025



Minat Wisatawan Mancanegara Mengunjungi DIY Tahun 2025



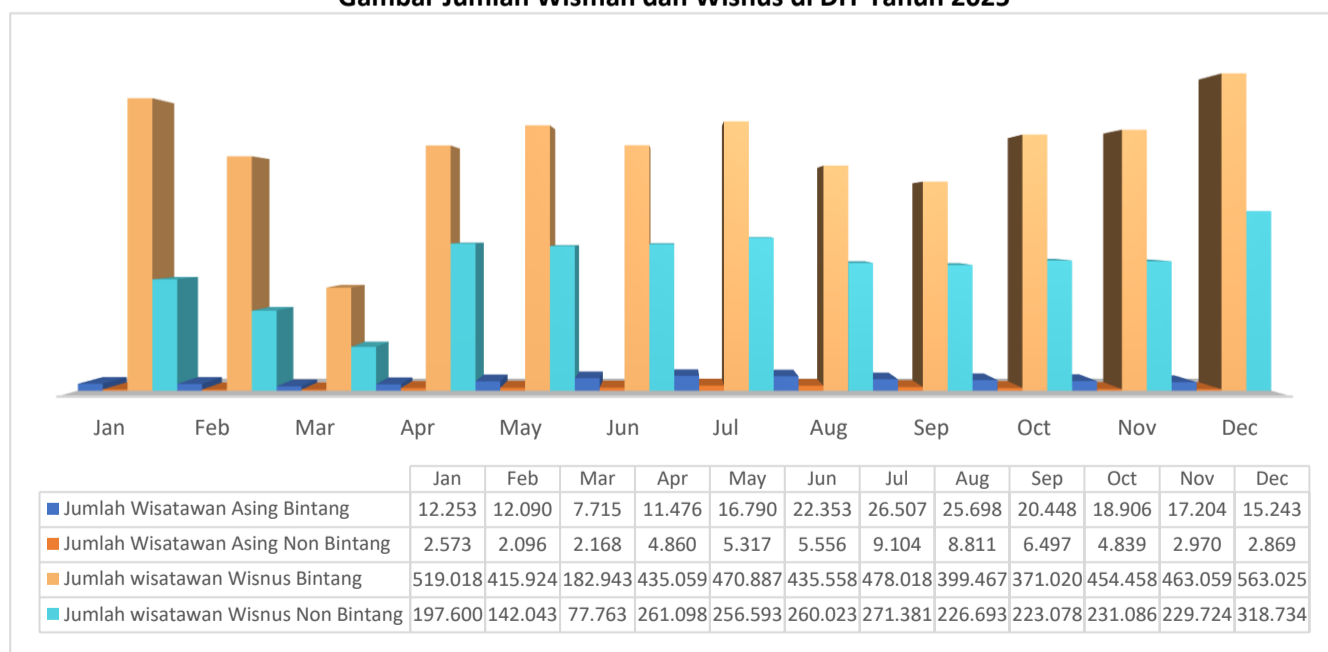
Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2026

Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2024-2025

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Kabupaten Kulon Progo	6	6	59	60	65	66
Kabupaten Bantul	3	3	382	400	385	403
Kabupaten Gunungkidul	4	5	152	167	156	172
Kabupaten Sleman	78	82	610	640	688	722
Kota Yogyakarta	116	121	590	586	706	707
Jumlah	207	217	1.793	1.853	2.000	2.070

Sumber: Direktori Hotel dan Akomodasi Lain Daerah Istimewa Yogyakarta BPS DIY, 2024 - 2025

Gambar Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2025



Sumber: BPS DIY Tahun 2026 (data diolah)

3. URUSAN PERTANIAN

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2025 serta Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022-2027

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target*	Realisasi	% Realisasi		
Tujuan							
Peningkatan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	2,42	1,980	1,980	100	1,980	100
Sasaran							
Rata-rata Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	%	0,96	0,25	2,60	1.040,20	0,21	1.238,09
Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	2,46	3,99	4,45	111,53	7,940	56,04

Ket.: * Target Penyelesaian

Sumber: BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Capaian Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Dalam PDRB (ADHK) Tahun 2025

No	Sub Sektor	Realisasi 2024 (Juta Rupiah)	Realisasi 2025 (Juta Rupiah)	Persentase Pertumbuhan (%)
1.	Tanaman pangan	3.090.848,7	3.113.465,2	0,73
2.	Hortikultura	2.696.228,7	2.741.311,4	1,67
3.	Perkebunan	250.974,1	256.589,3	2,24
4.	Peternakan	2.169.423,0	2.236.421,7	3,09
Total		8.207.474,5	8.347.787,6	1,70

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Capaian Produksi Sub Sektor Tahun 2024 dan 2025

No	Capaian Produksi Sub Sektor	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Rata-rata % Realisasi
1.	Tanaman pangan (ton)	1.648.043	1.997.624	21,21
2.	Hortikultura (ton)	315.778	301.706	-4,46
3.	Perkebunan (ton)	59.393	59.379	-0,02
4.	Peternakan (Animal Unit)	1.632.416	1.677.182	2,74
Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan (%)				2.60

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2024	2025
1	Padi	452.832	550.505
2	Jagung	374.470	442.806
3	Kedelai	4.309	4.030
4	Kacang Tanah	51.803	82.409
5	Kacang Hijau	182	583
6	Ubi Kayu	760.682	915.077
7	Ubi Jalar	3.765	2.214
8	Porang	N/A	N/A
Jumlah		1.648.043	1.997.624

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Produksi			Wujud Produksi
		2024 (Ton)	2025 (Ton)	% Peningkatan	
1	Kelapa	50.077	50.050	-0,05	Kopra
2	Tebu	3.224	3.222	-0,06	gula hablur
3	Kakao	2.026	2.028	0,10	biji kering
4	Cengkeh	856	861	-0,58	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	606	605	-0,17	daun kering
6	Kopi	1.877	1.886	0,48	biji kering
7	Jambu Mete	496	498	0,40	biji kering
8	The	231	229	-0,87	daun kering
TOTAL		59.393	59.379	0,02	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

Produksi Peternakan di DIY Tahun 2024-2025

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2024	2025
1	Daging Sapi Potong	Ton	8.195,58	9.619,65
2	Daging Sapi Perah	Ton	2,09	0,41
3	Daging Kerbau	Ton	0,22	0,43
4	Daging Kuda	Ton	75,08	73,33
5	Daging kambing	Ton	1.198,90	1.035,04
6	Daging Domba	Ton	2.209,43	1.566,81
7	Daging Babi	Ton	351,97	361,69
8	Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	67.172,57	70.089,44
9	Daging Itik	Ton	411,91	399,82
10	Telur Ayam Buras	Ton	2.296,53	2.299,25
11.	Telur Ayam Ras Petelur	Ton	115.519,51	112.775,76
Jumlah		Ton	197.433,79	198.221,63

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2026

4. URUSAN KEHUTANAN

Hasil Produksi Sektor Kehutanan Tahun 2023 - 2025

No	Sub Elemen	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Hasil Hutan Kayu*			
1.1	Kayu Bulat (m3)	2.215,00	664,60	175,00
1.2	Kayu Gergajian (m3)	3.429,79	3.563,96	2631,12
1.3	Kayu Olahan (m3)	9.302,31	6.956,85	4519,24
1.4	Kayu Hutan Rakyat (m3)	60.553,97	27.744,76	95.714,17
2	Hasil Hutan Bukan Kayu			
2.1	Kayu Putih			
2.1.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	2.216,5	2.168,75	2.136,42
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	19.529	19.609,00	20.008,00
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	44.000.000,00	2.915.955.166,00	143.801.450,00
3	Luas Lahan Reboisasi			
3.1	Realisasi (ha)	30,00	414,00	200,00
4	Luas Lahan Penghijauan			
4.1	Pembuatan Baru (ha)	406,00	267,00	29,00
4.2	Pemeliharaan (ha)	n/a	243,00	n/a

Sumber: DLHK DIY, 2026

Pada tahun 2025 terjadi Penurunan PAD disebabkan karena berkurangnya penjualan minyak kayu putih. Hal ini salah satu penyebabnya adalah perdagangan minyak atsiri saat ini didominasi oleh minyak atsiri impor yaitu minyak *Eucalyptus*, sehingga atas kondisi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu koordinasi dengan KLHK RI, Perhutani dan Kemendag untuk melakukan pembatasan impor minyak *Eucalyptus* dan pengenaan pajak atas minyak tersebut, serta dilakukan perjanjian jual beli dengan perorangan untuk minyak kayu putih.

5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2027) (%)	Capaian 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target*	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99	99,99	99,99	100	99,99	100
2	Persentase perusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	%	9,23	9,28	9,29	100,60	9,38	99,04
3	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	%	< 20	< 20	< 20	100	< 20	100

Ket: *Target Penyelarasan

Sumber: DPUPESDM DIY, 2026

6. URUSAN PERDAGANGAN

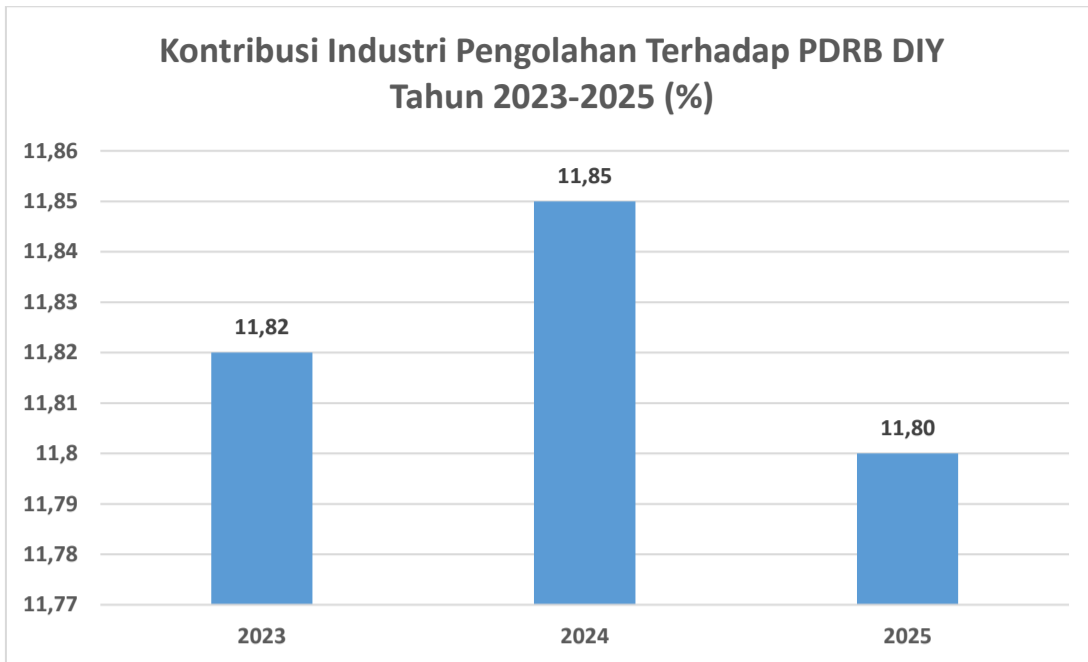


7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Perkembangan sektor industri di DIY Tahun 2021-2025

IKM	2021	2022	2023	2024	2025
Unit usaha (UU)	96.954	98.408	102.787	106.683	111.345
Tenaga kerja (orang)	394.680	387.210	294.030	373.480	361,27
Nilai investasi (Rp Juta)	1.047.923,60	1.270.466,10	1.346.179,20	1.866.965,59	2.082.078,21
Nilai PDRB sektor industri (Rp Miliar)	12.670,46	12.890,39	13.441,00	13.950,28	14.559,81

Sumber: BPS, Disperindag DIY, 2026



Sumber: BPS, Disperindag DIY, 2026 (diolah)

Pembinaan Sektor Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025



Sumber: Dinas Perindag DIY, 2025

8. URUSAN TRANSMIGRASI



Sumber: Disnakertrans DIY, 2026 (diolah)

Data Peserta Transmigrasi DIY Berdasarkan Asal Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

No.	Asal Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Jumlah Peserta Laki-laki (orang)	Jumlah Peserta Perempuan (orang)	Jumlah Anggota Keluarga (orang)
1.	Kulonprogo	5	10	10	20
2.	Bantul	3	3	5	8
3.	Gunung Kidul	3	7	2	9
4.	Sleman	-	-	-	-
5.	Kota Yogyakarta	4	7	7	14
Jumlah		15	27	24	51

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2026



Sumber: Disnakertrans DIY, 2026 (diolah)

E. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027, terdapat 7 sasaran Pemerintah Daerah dengan 13 indikator sasaran Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian Tahun 2025 Dibandingkan Target RKPD Tahun 2025	Persentase Capaian Tahun 2025 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2025	
Terwujudnya kualitas hidup kehidupan masyarakat	1.	Indek Pertumbuhan Inklusif/IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)		Angka Indek	5,90	6,52	6,52	5,90*	90,49* (Tidak Tercapai)	90,49* (Tidak Tercapai)	
	2.	Indek Kebahagiaan		Angka Indek	71,70	73,98	73,98	71,70	96,92 (Tidak Tercapai)	96,92 (Tidak Tercapai)	
		1)	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	01. Angka Kemiskinan	Persen	11,04	10,00-10,50	9,66	10,08	100 (Tercapai)	95,65 (Tidak Tercapai)
		2)	Penghidupan ekonomi yang layak	02. Angka Pertumbuhan Ekonomi / PDRB	Persen	5,07	5,3-5,8	5,2-5,8	5,49	100 (Tercapai)	100 (Tercapai)
				03. Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	Juta	31,75	31,51	31,51	34,76	110,31 (Tercapai)	110,31 (Tercapai)
				04. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	3,69	3,12-3,51	3,26-3,56	3,30	100 (Tercapai)	100 (Tercapai)
			05. Inflasi	Persen	3,30	3,1-3,8	2-4	3,11	100 (Tercapai)	100 (Tercapai)	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2025	Capaian 2025	Persentase Capaian Tahun 2025 Dibandingkan Target RKPD Tahun 2025	Persentase Capaian Tahun 2025 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2025
		3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	06. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	81,09	81,68	81,68	82,48	100,97 (Tercapai)	100,97 (Tercapai)
			07. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka Indeks	66,52	74,98	74,98	71,04	94,75 (Tidak Tercapai)	94,75 (Tidak Tercapai)
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	3. Indeks Williamson			Angka Indeks	0,4591	0,438	0,438	0,4606	94,84 (Tidak Tercapai)	94,84 (Tidak Tercapai)
		4) Meningkatkan kapasitas ekonomi pada ndicat belum maju	08. Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	Persen	40,15	40,13	40,13	39,98	99,63 (Tidak Tercapai)	99,63 (Tidak Tercapai)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4. Indeks Reformasi Birokrasi			Angka Indeks	A (88,15)	A (83,78)	A	A- (97,44) **	116,30 (Tercapai)	100 (Tercapai)
		5) Meningkatkan Good Governance	09. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100 (Tercapai)	100 (Tercapai)
			10. Nilai SAKIP	Angka	AA (92,10)	AA (92,80)	AA	AA (92,70)	99,89 (Tidak Tercapai)	100 (Tercapai)
			11. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	85,62	Tinggi (87,31-90,57)	Tinggi	Tinggi (89,25)	100 (Tercapai)	100 (Tercapai)
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka Indeks	66,29	Sedang (64,19)	Sedang	Sedang (76,45)	119,10 (Tercapai)	100 (Tercapai)
		6) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	12. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	N/A	83,74	83,74	86,59	103,40 (Tercapai)	103,40 (Tercapai)
		7) Menurunnya risiko bencana	13. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indeks	102,83	108,70	108,70	88,91	118,21 (Tercapai)	118,21 (Tercapai)

Ket.: * (Capaian IGI masih menggunakan capaian tahun 2024); ** (Hasil Penilaian Sementara KemenPAN RB terhadap IRB Pemda DIY Tahun 2025)

Sumber: Bapperida DIY, 2026 (Data diolah)

Berdasarkan tabel Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemda DIY pada tahun 2025 menunjukkan dari 4 Tujuan Pemda dengan 5 indikator tujuan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja tujuan yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ terhadap target RKPD tahun 2025 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan IKLH. Dengan demikian, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja tujuan yang capaiannya dibawah 100% atau belum tercapai sesuai dengan target yaitu: Indeks Pertumbuhan Inklusif, Indeks Kebahagiaan dan Indeks Williamson.

Selanjutnya dari 7 Sasaran Pemda dengan 13 indikator kinerja utama yang memiliki persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ terhadap target RKPD DIY Tahun 2025 adalah angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Inflasi, IPM, Opini BPK, IDI, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan IRBI. Dengan demikian, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai dengan target yaitu: Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY, dan Nilai SAKIP.

Dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 12 (dua belas) indikator mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 diantaranya: Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Jika dibandingkan dengan target RKPD DIY tahun 2025 terdapat 6 indikator yang belum memenuhi target, diantaranya: Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI), Indeks Kebahagiaan, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Williamson, Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY, dan Nilai SAKIP. Sedangkan, dibandingkan dengan target RPJMD DIY (2025) terdapat 6 indikator yang belum memenuhi target, yaitu Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI), Indeks Kebahagiaan, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Williamson, dan Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY.

F. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,6645 dan status kinerja tinggi (peringkat ke-3 Nasional).

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2024 Nomor 7A/LHP/XVIII.YOG/04/2025, Pemda DIY berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemda DIY telah memperoleh opini BPK WTP ke-15 (lima belas) kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010 dan telah sesuai dengan target yang ditentukan.

G. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.835.587.382.957,00	4.869.450.568.324,59	100,70	6.025.070.171.261,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.793.594.279.035,00	1.839.847.607.163,59	102,58	2.481.506.565.559,08
4.1.01	Pajak Daerah	1.521.266.024.486,00	1.541.673.476.325,25	101,34	2.157.532.293.945,00
4.1.02	Retribusi Daerah	72.579.914.151,00	79.022.419.102,85	108,88	79.460.801.542,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	126.006.483.045,00	127.241.046.476,91	100,98	120.935.677.671,93
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.741.857.353,00	91.910.665.258,58	124,64	123.577.792.400,15
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.793.594.279.035,00	1.839.847.607.163,59	102,58	2.481.506.565.559,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.034.387.603.922,00	3.022.299.662.161,00	99,60	3.535.479.452.702,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.033.406.677.291,00	3.021.318.735.530,00	99,60	3.534.495.647.472,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631,00	980.926.631,00	100,00	983.805.230,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	980.926.631,00	980.926.631,00	100,00	983.805.230,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.034.387.603.922,00	3.022.299.662.161,00	99,60	3.535.479.452.702,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	96,03	8.084.153.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	96,03	8.084.153.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.303.299.000,00	96,03	8.084.153.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.835.587.382.957,00	4.869.450.568.324,59	100,70	6.025.070.171.261,08
5	BELANJA DAERAH	5.112.741.612.241,00	4.730.506.066.437,52	92,52	5.680.495.088.297,12
5.1	BELANJA OPERASI	3.455.048.853.310,00	3.257.370.556.718,18	94,28	3.589.908.402.394,35
5.1.01	Belanja Pegawai	1.759.709.437.784,00	1.647.593.991.609,00	93,63	1.651.782.965.460,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.729.944.545,00	1.078.988.412.794,18	92,96	1.155.896.100.440,35
5.1.04	Belanja Subsidi	96.029.746.301,00	95.355.621.534,00	99,30	75.368.890.530,00
5.1.05	Belanja Hibah	407.608.018.680,00	405.156.875.823,00	99,40	653.554.770.630,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.971.706.000,00	30.275.654.958,00	97,75	53.305.675.334,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.455.048.853.310,00	3.257.370.556.718,18	94,28	3.589.908.402.394,35
5.2	BELANJA MODAL	727.828.251.159,00	606.066.257.104,00	83,27	659.153.310.940,95
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	122.858.100,00	61,43	35.792.256.125,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.596.510.665,00	165.720.594.811,00	92,79	204.099.193.397,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.299.668.188,00	198.928.668.595,00	65,16	220.538.449.546,95
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.565.348.183,00	232.553.303.352,00	99,14	182.299.322.051,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.886.724.123,00	8.463.832.246,00	95,24	11.562.606.421,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	280.000.000,00	277.000.000,00	98,93	4.861.483.400,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	727.828.251.159,00	606.066.257.104,00	83,27	659.153.310.940,95
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63	20.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63	20.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	39.476.792.633,00	3.405.377.000,00	8,63	20.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	890.387.715.139,00	863.663.875.615,34	97,00	1.431.413.374.961,82
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	547.966.592.107,00	541.272.131.059,00	98,78	870.359.406.509,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	342.421.123.032,00	322.391.744.556,34	94,15	561.053.968.452,82
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	890.387.715.139,00	863.663.875.615,34	97,00	1.431.413.374.961,82
	JUMLAH BELANJA	5.112.741.612.241,00	4.730.506.066.437,52	92,52	5.680.495.088.297,12
	SURPLUS/DEFISIT	(277.154.229.284,00)	138.944.501.887,07	(50,13)	344.575.082.963,96
6	PEMBIAYAAN DAERAH	277.154.229.284,00	280.267.729.284,44	101,12	93.121.146.320,48
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	437.696.229.284,00	437.767.729.284,44	100,02	295.621.146.320,48
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284,00	437.696.229.284,44	100,00	295.260.470.320,48
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	71.500.000,00	0,00	360.676.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	437.696.229.284,00	437.767.729.284,44	100,02	295.621.146.320,48
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	160.542.000.000,00	157.500.000.000,00	98,11	202.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	155.542.000.000,00	155.000.000.000,00	99,65	200.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	50,00	2.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	160.542.000.000,00	157.500.000.000,00	98,11	202.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	277.154.229.284,00	280.267.729.284,44	101,12	93.121.146.320,48
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	419.212.231.171,51	0,00	437.696.229.284,44

Sumber: LRA Pemda DIY (Unaudited), BPKA DIY, 2026

H. INOVASI DAERAH

Rincian inovasi daerah yang memenuhi syarat kematangan untuk diikuti dalam Innovative Government Adward (IGA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. SIMPATI DATAKU (Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan DATAKU);
2. Sengguh untuk Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Jogja Istimewa;
3. Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Berkelanjutan;
4. ASN MEMAYU;
5. Saka Wirausaha;
6. Sepatu Jolifa;
7. Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL);
8. Manunggal Raharja;
9. PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Tenant dan Masyarakat);
10. SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk);
11. Omah Jaga Warga;

12. Samsat Kalurahan Lima Tahunan "SALIMAN";
13. Rajutan SiBakul;
14. SI POJAK (Sistem Informasi Potensi Pajak);
15. Aplikasi Manajemen Pengetahuan;
16. Aplikasi Posbindu;
17. Klasifikasi Kampung Wisata;
18. Ngesti Bumi (Ngelayani Seluruh Tanah dan Tata Ruang Istimewa dengan Berpijak Untuk Menyejahterakan Insan);
19. Kreasi SI Komo, Klinik Koperasi Strategi Menuju Koperasi Modern;
20. Aplikasi Kenes (Kendali Istimewa);
21. Diorama Arsip Jogja;
22. SI JELITA (Sistem Jemput Lima Tahunan);
23. PELADI MAKARTI;
24. INSAN PUPR BERKUMIS: Integrasi Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berkolaborasi Untuk Mengurangi Kemiskinan di DIY;
25. Si Yokca;
26. ARUNIKA (Aplikasi Terintegrasi Untuk Administrasi Penilaian Kompetensi ASN);
27. MRANTASI (Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi);
28. Jogja Hijau;
29. FORUM KOMUNIKASI EKSPOR;
30. Lumbung Mataraman;
31. Aplikasi SIKRESNO (Sistem Kendali Registrasi Organisasi Kemasyarakatan dan Politik) Sistem Informasi Ormas;
32. SIKELING;
33. Kir OMO;
34. Sekolah Berwawasan Geopark;
35. *Integrated Management Training (IMT) Berbasis Android Mobile*;
36. KURASI PRODUK PKG YIA (Kurasi Produk Pasar Kotagede YIA);
37. Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
38. Sistem Pengelolaan Data Perizinan dan Penanaman Modal (SEPEDA PANDA);
39. Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran DIY;
40. Pelatihan Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
41. SPREAD - Strategi Pengembangan Redistribusi Atasi Disparitas Tenaga Kesehatan Antar Wilayah;
42. SIMPerpustakaan;
43. SIPGELIS (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan);
44. KINARYA;
45. Pakaian Tradisional Jawa Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta;
46. SADEWA (Sistem Penandatanganan Dokumen Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta);
47. INTEGRASI INFORMASI ANGKUTAN UMUM MELALUI DIGITAL SIGNAGE DI HALTE TRANSJOGJA;
48. Operasi Yustisi Ikut Menopang Kas Daerah;
49. Budidaya Lele Generasi Air Kocor (Lele Gacor);

Disamping inovasi daerah, sepanjang tahun 2025 Pemda DIY mendapatkan penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, di antaranya adalah:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pemda DIY kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan skor 89,25. Prestasi ini diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemendagri) RI di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 25 September 2025;
2. Pemda DIY meraih Predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025 di Auditorium KH M. Rasjidi, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025;
3. Pada SPM Award 2025 Pemda DIY memperoleh penghargaan dalam kategori Penerapan SPM Terbaik Regional Jawa. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Jumat, 23 Mei 2025 di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
4. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima secara langsung penganugerahan Mandaya Awards 2025 pada Kamis 16 Oktober 2025 di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan. Pada penganugerahan ini DIY dinobatkan sebagai juara pertama untuk Kategori Provinsi berkat keberhasilannya dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Pemda DIY kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih tujuh penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2025. Acara yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan Republik ini berlangsung dalam malam puncak Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025. DIY menjadi salah satu provinsi dengan jumlah raihan penghargaan terbanyak. Adapun tujuh kategori yang dimenangkan yaitu:

- a. Juara 1 Kategori Sekolah Pelopor dalam Ekonomi Syariah;
 - b. Juara 1 Kategori Inkubasi Syariah;
 - c. Juara 2 Kategori Keuangan Mikro Syariah
 - d. Juara 3 Kategori Keuangan Sosial Syariah
 - e. Juara 3 Kategori Inovasi Ekonomi Syariah
 - f. Juara 4 Kategori Literasi Ekonomi Syariah; serta
 - g. Juara 5 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.
6. Pemda DIY kembali meneguhkan komitmennya dalam pelestarian kebudayaan nasional. Melalui ajang Malam Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025, DIY berhasil menorehkan dua penghargaan bergengsi sekaligus, yakni kategori Pemerintah Daerah Terbaik dan Museum Terbaik melalui Museum Sonobudoyo;
 7. Pemda DIY memperoleh penghargaan Wirasena 2025 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Selasa, 28 Oktober 2025. Penghargaan ini diberikan atas penilaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) DIY yang tertinggi secara nasional. Penyerahan penghargaan ini dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir pada Puncak Acara Nasional Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 Tahun 2025 di Hall Basket Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta;
 8. Kebijakan Reformasi Kalurahan Inklusif DIY memperoleh penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada acara Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025. Bertempat di Gedung B.J. Habibie BRIN, Jakarta, gelaran apresiasi ini diadakan bersamaan dengan Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah (FKRID) 2025 pada Senin, 27 Oktober 2025;
 9. Pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat, 25 April 2025 Pemda DIY meraih peringkat ke-3 nasional untuk kategori Pemerintah Provinsi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
 10. Pada ajang The 7th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025 di JW Marriott Hotel Surabaya, Kamis, 25 September 2025 Pemda DIY berhasil dinobatkan sebagai Pemenang Institusi Publik Terpopuler di Media Sosial untuk subkategori Pemerintah Provinsi. Penghargaan bergengsi ini merupakan apresiasi tertinggi bagi insan kehumasan dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, hingga korporasi di Tanah Air;
 11. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memperoleh Penghargaan Adibahasa 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI atas capaian tertinggi dalam Indeks Pembangunan Kebahasaan (Ipebas) 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diserahkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2025, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa, 28 Oktober 2025;
 12. Kementerian Komunikasi dan Digital RI menganugerahkan piagam penghargaan kepada DIY atas keberhasilan dalam implementasi program Smart Province 2024. Kali ini, DIY dinobatkan sebagai daerah yang unggul dalam kategori *Smart Living*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment* dalam ajang Gerakan Menuju *Smart Province*. Penghargaan disampaikan pada acara *Smart City Business Matchmaking* yang digelar di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu, 27 Agustus 2025;
 13. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY berhasil meraih TPAKD Award 2025, kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa-Bali. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025 dan diterima langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X;
 14. DIY dinobatkan sebagai Juara Umum Anugerah Media Humas (AMH) 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI. DIY dinilai unggul pada kategori siaran pers yang meraih predikat terbaik pertama, website yang juga terbaik pertama, serta audiovisual menjadi terbaik kedua. Penghargaan diberikan oleh Menkomdigi, Meutya Hafid, Kamis, 12 November 2025 di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat;
 15. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianugerahi Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2025 dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diserahkan pada Senin, 17 November 2025 di Gedung F Kemendagri, Jakarta, sebagai bentuk pengakuan atas tingginya kualitas harmoni sosial di DIY;
 16. Pemda DIY meraih predikat Terbaik Ketiga kategori Pemerintah Daerah Provinsi pada Indonesia's *SDGs Action Awards* (SAA) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, di Gedung Utama Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu 19 Oktober 2025;
 17. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh penghargaan sebagai Pembina Produktivitas Tahun 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam acara Naker Inspirational and Leadership Award 2025, Senin, 8 Desember 2025 di Balai Kartini Jakarta;
 18. Berdasarkan survei nasional terhadap upaya pencegahan korupsi, DIY meraih skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 sebesar 79,4. Skor ini membuat DIY ditetapkan sebagai Provinsi dengan Skor Integritas Tertinggi secara nasional. Pencapaian skor 79,4 ini menempatkan Pemerintah Provinsi DIY

- pada kategori integritas tertinggi. Dalam klasifikasi yang ditetapkan KPK, skor ini masuk dalam kategori Terjaga ≥ 78.00 , yang artinya keadaan integritas telah terbangun kuat dan terkontrol;
19. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meraih Juara 2 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa–Bali pada ajang bergengsi TPID Award 2025, yang diumumkan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2025 di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. Acara tersebut diinisiasi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI;
 20. DIY menorehkan prestasi rangking 1 nasional untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025. Kolaborasi menjadi keunggulan DIY hingga mampu memperoleh skor 74,91. Skor IKIP DIY berada di atas skor nasional yang berada di angka 66,43 poin. Pengumuman IKIP 2025 disampaikan langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Capaian DIY ini pun menjadi bukti komitmen badan publik di DIY dalam menjalankan keterbukaan informasi, mulai dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudahan akses informasi bagi masyarakat, hingga pelaksanaan putusan sengketa informasi publik;
 21. Pemda DIY berhasil meraih Penghargaan Terbaik 1 Nasional, Kualitas Data Terbaik pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025, dan Penghargaan Harapan 3 Nasional atas Capaian Tertinggi Tepat Waktu pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan pada rangkaian acara Evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat DIY Tahun 2025 yang digelar di Loman Park Hotel, Yogyakarta, Selasa, 16 Desember 2025;
 22. Pemda DIY berhasil meraih Peringkat Kedua Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi pada Harmony Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Penganugerahan berlangsung pada Jumat (28/11) malam di Hotel DoubleTree by Hilton Kemayoran, Jakarta. Harmony Award merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta organisasi keagamaan yang dinilai berhasil mengembangkan program penguatan kerukunan umat beragama, membangun forum lintas iman, serta menangani isu-isu keberagaman secara efektif dan berkelanjutan;
 23. DIY Meraih Penghargaan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Terbaik Nasional Tahun 2025 (Penghargaan Swasti Saba). Penghargaan ini diberikan secara kolaboratif oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tatanan wilayah yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Acara penganugerahan tahun ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Auditorium Siwabessy, Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan;
 24. Penghargaan untuk Pemerintah Daerah DIY sebagai Pemerintah Provinsi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 25. Peringkat Proper Biru Periode 2023-2024, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI pada tahun 2025;
 26. Penghargaan atas Juara III dalam Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tahun 2025 jabatan kerja “Operator Alat Berat”, Kompetisi ini diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya pada tanggal 25–26 November 2025;
 27. Pada Tahun 2025 Pemda DIY memperoleh penghargaan peringkat ke 5 (lima) dalam Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Tingkat Provinsi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN;
 28. Pada tahun 2025, Terminal Tipe B Jombor yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan DIY meraih penghargaan Terminal Tipe B Terfavorit dalam ajang *People’s Choice Award 2025 RedBus*, sebagai bentuk pengakuan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan;
 29. Penghargaan Provinsi dengan Validasi Data 100% untuk seluruh bidang Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024 dari Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima pada tanggal 28 Mei 2025;
 30. Penghargaan Peringkat III Indonesia’s SDGs Action Award (SAA) 2025 Kategori Pemerintah Daerah Provinsi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pertanian yang diterima pada tanggal 19 November 2025. Inovasi yang mengantarkan DIY meraih apresiasi nasional ini merupakan terobosan di bidang ketahanan pangan melalui metode budidaya Lele Gacor (Lele Generasi Air Kocor).
 31. *Harmony Award* merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta organisasi keagamaan yang dinilai berhasil mengembangkan program penguatan kerukunan umat beragama, membangun forum lintas iman, serta menangani isu-isu keberagaman secara efektif dan berkelanjutan. Pada Tahun 2025, Pemerintah daerah DIY mendapatkan peringkat kedua terhadap Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI.



Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Balikpapan, Kaltim, 25 April 2025



Penghargaan SPM Awards 2025, Gedung Serbaguna Ditjen Bina Bangda Kemendagri, 23 Mei 2025



Penghargaan TPKAD Terbaik Jawa-Bali, Balai Kartini, Jakarta, 10 Oktober 2025



DIY Raih Provinsi Layan Anak (PROVILA) 2025, Auditorium KH. M. Rasjidi, Jakarta, 8 Agustus 2025



Piagam Penghargaan kepada DIY Atas Keberhasilan Dalam Implementasi Program *Smart Province*, Hotel Tentrem, Yogyakarta, 27 Agustus 2025



Mandaya Award 2025, Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, 16 Oktober 2025



Penghargaan Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi se-Indonesia dari Kemenpora



Pemda DIY Meraih Juara Umum pada Anugerah Media Humas (AMH) 2025, Hotel Borobudur, Jakarta, 17 November 2025



Penghargaan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Terbaik Nasional Tahun 2025 (Penghargaan Swasti Saba), Auditorium Siwabessy Kemenkes, 28 November 2025



Penghargaan Evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), BKKBN DIY, 16 Desember 2025



Penghargaan *Harmony Awards* Tahun 2025 dari Kementerian Agama



Penerimaan Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Kategori Pemda Tahun 2025

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2025 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik di jajaran Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 10 Maret 2026
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X